

**Kajian Profil Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Pulau Gili Kecamatan
Sumberasih Kabupaten Probolinggo**

**LAPORAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN**

Oleh :

HAGI PRIMADASA JUNIARTA

NIM. 0810840020



FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2012

**Kajian Profil Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Pulau Gili Kecamatan
Sumberasih Kabupaten Probolinggo**

**LAPORAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Perikanan Pada Fakultas
Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya**

Oleh :

HAGI PRIMADASA JUNIARTA

NIM. 0810840020



FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2012

**Kajian Profil Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Pulau Gili Kecamatan
Sumberasih Kabupaten Probolinggo**

Oleh :

HAGI PRIMADASA JUNIARTA

NIM. 0810840020

Telah dipertahankan di depan penguji

pada tanggal 2 Agustus 2012

dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Dosen Penguji I

(Dr. Ir. Ismadi, MS)

NIP. 19490515 197802 1 001

Tanggal :

Dosen Penguji II

(Erlinda Indrayani, S.pi. M.si)

NIP. 1974 02202003 122 001

Tanggal :

Dosen Pembimbing I

(Dr. Ir. Edi Susilo, MS)

NIP.19591205 198503 1 003

Tanggal :

Dosen Pembimbing II

(Ir. Mimit Primyastanto, MP)

NIP. 19570911 198503 1 003

Tanggal :

**Mengetahui,
Ketua Jurusan SEPK**

(Dr. Ir. Nuddin Harahab, MP)

NIP. 19610417 199003 1 001

Tanggal:

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HAGI PRIMADASA JUNIARTA

Nim : 0810840020

Judul Skripsi : Kajian Profil Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Pulau Gili Kecamatan

Sumber Asih Kabupaten Probolinggo

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Malang, 2 Agustus 2012

Mahasiswa

Hagi Primadasa Juniarta

0810840020

RINGKASAN

HAGI PRIMADASA JUNIARTA. Skripsi tentang Kajian Profil Kearifan Lokal Masyarakat Pulau Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo) (dibawah bimbingan **Dr. Ir. Edi Susilo, M.S dan Ir. Mimit Primyastanto, MP).**

Panjang pesisir di wilayah Indonesia yang menduduki pesisir terpanjang kedua setelah Kanada ini menyebabkan sektor perikanan merupakan potensi sumber daya alam yang menjajikan dari negara ini yang perlu dijaga kelestariannya. Kearifan lokal merupakan tata nilai kehidupan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang berbentuk religi, budaya ataupun adat istiadat yang umumnya dalam bentuk lisan dalam suatu bentuk sistem sosial suatu masyarakat. Keberadaan kearifan lokal dalam masyarakat merupakan hasil dari proses adaptasi turun menurun dalam periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan yang biasanya didiami ataupun lingkungan dimana sering terjadi interaksi didalamnya. Di beberapa wilayah di tanah air sudah banyak kearifan lokal yang menjadi contoh dalam pengelolaan lingkungan yaitu diantaranya *Panglima Laot*, *Awig-awig* dan *Mane'e*. kearifan lokal tersebut diterapkan hampir turun menurun oleh masyarakat setempat misalnya untuk *Panglima Laot* di Aceh dan awig-awig di Buleleng Bali dan keberadaannya sangat mempengaruhi kelestarian lingkungan setempat.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan nilai-nilai kearifan lokal apa saja yang terdapat pada masyarakat pesisir Pulau Gili Ketapang Kabupaten Probolinggo, (2) Menjelaskan eksistensi kearifan lokal di masyarakat pulau Gili, (3) Menjelaskan fungsi dan manfaat kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat pulau Gili, dan (4) Bagaimana membangun model penegelolaan berbasis kearifan lokal masyarakat. Tempat penelitian ini dilaksanakan di Pulau Gili Ketapang, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo yang berada di Provinsi Jawa Timur. Penentuan lokasi ini karena Pulau Gili memiliki potensi perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan yang melimpah dan memiliki prospek yang baik. Waktu penelitian dilaksanakan di bulan Februari 2012. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan etnografi. Studi etnografi (*ethnographic studies*) mendeskripsikan dan menginterpretasikan budaya, kelompok sosial atau sistem

Data yang diambil adalah data primer berupa hasil wawancara dan observasi sedangkan data sekunder diperoleh dari data tertulis yang didapat dari lokasi penelitian tersebut. Analisis data yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif mengenai kearifan lokal dalam masyarakat Pulau Gili Ketapang. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa di wilayah pesisir dan lautan Pulau Gili Ketapang terdapat potensi perikanan yang melimpah. Pulau Gili Ketapang memiliki beberapa budaya dan tradisi yang cukup potensial untuk dikembangkan sebagai model pembangunan sumber daya perikanan berkelanjutan dengan berbasis masyarakat lokal. Dengan model co manajemen ini setidaknya lebih memberdayakan masyarakat lokal dan juga setidaknya ada dampak positif terhadap ekonomi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pulau Gili Ketapang seperti yang telah dijabarkan pada bab-bab satu hingga empat, maka dapat diambil kesimpulan bahwa (1) Terdapat tujuh tradisi atau budaya yang terdapat di pulau Gili Ketapang, yaitu : Petik laut, *onjem*, *nyabis*, *andun*, kontrak kerja, *pengambek*, dan *telasan*. (2) Dari ketujuh tradisi tersebut hanya dua yang berpotensi sebagai kearifan lokal yang memenuhi syarat menurut Christy (1992) yang dapat digunakan dalam membangun hak guna wilayah perikanan. Yaitu *onjem* dan petik laut. Pembangunan yang dapat diterapkan dengan melihat kondisi budaya dan kondisi masyarakat setempat adalah model pembangunan berkelanjutan dengan berbasis masyarakat lokal atau yang lebih sering disebut co manajemen. (3) Terdapat dua pendekatan yang harus dilakukan pada konsep pembangunan yang dilakukan pada masyarakat pulau Gili Ketapang, yaitu pendekatan

struktural dan pendekatan non struktural. Untuk pendekatan non struktural diperlukan beberapa pendekatan, diantaranya adalah, Pengembangan keterampilan masyarakat, Peningkatan pengetahuan dan wawasan lingkungan. Peningkatan animo masyarakat agar berperan serta. Peningkatan kualitas pendidikan formal sumber daya manusia. Memberikan motivasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat. Sedangkan untuk pendekatan struktural diantaranya membentuk lembaga lokal, Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi, Pengembangan akses masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan.

Pada upacara petik laut dapat disisipkan acara yang lebih bersifat memiliki manfaat terhadap lingkungan agar dapat terpenuhi sebagai kearifan lokal dalam pengelolaan wilayah perikanan diataranya :

- Pada upacara larung sesaji, ditambahkan pelepasan benih-benih ikan dilaut dalam jumlah banyak sehingga ada manfaat lingkungan yang didapat tanpa mengganti isi dari larung sesaji yang asli.
- Selain pada upacara larung sesaji, ditambahkan kegiatan transplatasi terumbu karang dilaut dangkal sekitar Pulau Gili Ketapang. kegiatan ini memutuhkan ahli dalam bidangnya, maka dari itu diperlukan kerja sama dengan ahli terkait tanpa melepas peran serta masyarakat Pulau Gili Ketapang.
- Pada acara hiburan petik laut, yang umumnya dilangsungkan selam dua hari, selain adanya pagelaran kesenian ludruk Madura, akan lebih bermanfaat, pihak pemerintah masuk dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan sehingga penambahan wawasan dan pengetahuan masyarakat tercapai.
- Upacara petik laut, seyogyanya diagendakan dalam setiap tahun dengan pasti sehingga ini bisa dijadikan komoditi pariwisata dan bisa menambah nilai jual Pulau Gili Ketapang yang seharusnya bisa dijadikan sebagai lokasi ekowisata.

Pada budaya *onjem* atau rumpon dapat diperbaiki dan diperbanyak dengan peran serta pemerintah dalam memberikan penyuluhan yang baik dalam pembuatan rumpon, memberikan alat-alat yang dibutuhkan seperti GPS dan bantuan tenaga ahli sehingga lebih banyak onjem yang dimiliki warga. Nantinya diharapkan, pada kondisi musim paceklik, meskipun hasil ikan sedikit yang didapatkan dari rumpon, setidaknya menjamin ketersediaan ikan sebagai komoditas utama nelayan. Selain itu, adanya transplatasi terumbu karang secara jangka panjang akan meningkatkan ketersediaan sumberdaya ikan dilaut. Selain itu, komoditi pariwisata juga bisa terbantu dengan adanya terumbu karang yang baik atau lestari.

Saran bagi pemerintah Probolinggo adalah : (1)Pembangunan berbasis masyarakat tidak serta merta dilakukan mandiri oleh masyarakat, perlu bantuan dari pemerintah mulai dari biaya, tenaga ahli dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan agar pembangunan berkelanjutan dengan berbasis masyarakat lokal bisa terwujud. (2)Pembangunan yang dilakukan di Pulau Gili Ketapang harus melihat berbagai aspek, seperti sektor ekonomi, masyarakat, sosial, budaya, dan pemerintah desa, daerah maupun pusat. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan antara satu dengan yang lainnya. Untuk mewujudkan keterpaduan tersebut maka dalam perencanaan pembangunan harus mengintegrasikan semua kepentingan pada sektor-sektor yang terlibat. Maka dari itu perlu ada musyawarah untuk mencapai kata mufakat dalam perencanaan pembangunan. Seperti kerjasama Bappedakab dan Departemen Kelautan dan Perikanan Kabupaten Probolinggo dalam perencanaan rencana strategis pengelolaan pulau dan pesisir. (3) Untuk memanfaatkan potensi sumberdaya alam di pulau Gili Ketapang diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh pada usaha peningkatkan keterampilan dan pengetahuan terhadap teknik-teknik penangkapan melalui kegiatan pelatihan serta studi banding di tempat-tempat yang sudah maju dalam hal pemberdayaan masyarakat lokal. (4) Dalam merangkai kebijakan-kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan, baik dalam usaha pemanfaatan

maupun dalam pengelolaan sumberdaya alam laut dan pesisir di Pulau Gili Ketapang, dan Kabupaten Probolinggo secara umum, perlu dipertimbangkan kekayaan kearifan lokal yang ada dan dilakukan identifikasi karakteristik sosial masyarakat pesisir secara cermat. Ini penting dilakukan dalam membentuk nilai yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari sebagai dasar dan filosofi dalam membangun keserasian, keharmonisan antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya, sehingga membawa hasil yang optimal. (5) Untuk itu dalam strategi pengelolaan, pengawasan sumberdaya pesisir dan pemberdayaan masyarakat diharapkan sedapat mungkin nilai kearifan lokal, tradisi/hukum adat beserta sistem kelembagaan yang ada, baik kelembagaan yang nyata berupa struktur masyarakat adat dan organisasi formal pemerintahan maupun Lembaga formal, Keputusan Bupati, Keputusan Camat, sampai Keputusan Desa hendaknya dapat mengakomodir dan memanfaatkan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup, bertumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

Sedangkan untuk masyarakat Pulau Gili Ketapang: (1) Perlu adanya keterbukaan dalam menerima hal baru berupa wawasan dan pengetahuan sehingga tidak terjadi ketidakberhasilan model pembangunan berbasis pengetahuan lokal. (2) Perlu adanya penguatan kelompok-kelompok nelayan atau lembaga lokal sehingga mudah dalam terbentuknya model co manajemen dalam masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lingkungan di Pulau Gili Ketapang. (3) Perlu adanya perubahan mindset bahwa pendidikan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan guna membangun keterbukaan dalam pengetahuan dan wawasan.



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi beserta laporan penelitian skripsi, dengan judul tentang Kajian Profil Kearifan Lokal Masyarakat Pulau Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo. Laporan penelitian skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, Malang.

Di dalam laporan penelitian skripsi ini, disajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi maksud dan tujuan penelitian skripsi, metode penelitian, hingga pembahasan dan hasil pembahasan dari judul penelitian skripsi diatas.

Penulis sangat menyadari bahwa isi dari Laporan penelitian skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan dalam isi maupun redaksi. Dalam hal ini penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca, demi kebaikan penulis.

Dengan terselesaikannya laporan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Mamam dan Papap atas semuanya yang tidak bisa dibalas oleh penulis sehingga laporan dapat terselesaikan.
2. Bapak Dr. Ir. Edi Susilo, MS dan Bapak Ir. Mimit Primyastanto. MP selaku Dosen Pembimbing atas segala pelajaran dan bimbingannya hingga terselesaikannya laporan penelitian skripsi ini.
3. Bapak Toyyib, Idrus, dan Sugianto yang telah memberikan tempat tinggal selama masa penelitian
4. Semua informan dan warga Pulau Gili Ketapang yang telah menerima peneliti dengan baik dan keramah-tamahannya.
5. Teman-teman SEP 2008 dan semua pihak serta yang telah membantu dalam proses penyusunan laporan penelitian skripsi ini.

Malang, 2 Agustus 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
RINGKASAN	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Kegunaan Penelitian.....	6
1.5. Tempat dan Waktu Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Tinjauan Umum Wilayah Pesisir.....	8
2.1.1. Pengertian Wilayah Pesisir.....	9



2.1.2. Ciri dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir	9
2.1.3. Kelembagaan dalam Masyarakat pesisir	10
2.1.4. Pemberdayaan Kelembagaan Lokal.....	11
2.1.5. Pengertian Kearifan Lokal	12
2.1.6. Syarat Pengelolaan Perikanan Berbasis Kearifan lokal	14
2.1.7. Beberapa Contoh Kearifan Lokal.....	15
a. Tradisi Hukum adat lhaot di Propinsi NAD.....	15
b. Adat Sasi di Maluku.....	17
c. Tradisi Awig-awig di Lombok Barat NTB.....	17

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN **19**

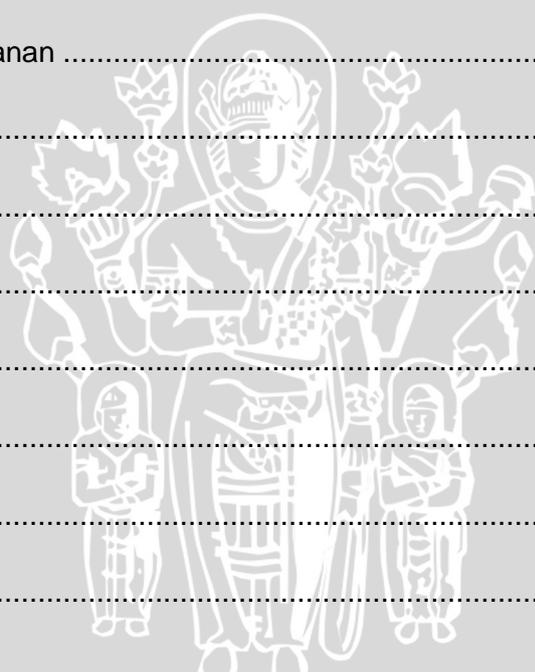
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	19
3.2. Objek Penelitian	19
3.3. Fokus Penelitian.....	20
3.4. Metodologi Penelitian	20
3.5. Teknik Pengambilan Data	22
a. Wawancara.....	22
b. Observasi.....	24
c. Dokumentasi	25
d. Kuesioner.....	25
e. rekaman arsip	26
3.6. Teknik Pengambilan Sampel.....	26
3.7. Jenis dan Sumber Data.....	27



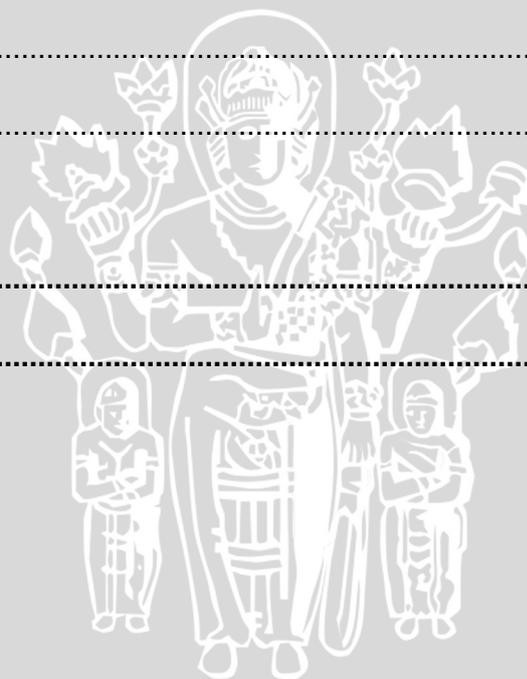
3.7.1. Data Primer	27
3.7.2. Data Sekunder	28
3.8. Kerangka Berfikir	28

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 30

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
4.1.1. Letak Geografis Kabupaten Probolinggo	30
4.1.2. Kondisi Geografis dan Topografi Kecamatan Sumberasih	30
4.1.3. Keadaan Penduduk	33
4.2. Keadaan Umum Perikanan	34
4.3. Potensi Kearifan Lokal	35
4.3.1. Petik Laut	35
4.3.2. Nyabis	38
4.3.3. Pengambek	39
4.3.4. Onjem	40
4.3.5. Kontrak Kerja	44
4.3.6. Telasan	44
4.3.7. Andun	46
4.4. Konsep Kearifan Lokal dan Kearifan Lokal Masy. Pulau Gili	47
4.4.1. Interpretasi Tabel Kearifan Lokal	52
a. petik laut	52
b. nyabis	53
c. pengambek	53
d. onjem	54



e. kontrak kerja.....	55
f. andun.....	55
g. telasan.....	56
4.5. Pemanfaatan Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Berkelanjutan.....	56
4.6. Peluang Pemberdayaan Kearifan Lokal.....	58
4.7. Model Pengelolaan dan Pemberdayaan.....	60
4.8. Membangun Model Pengelolaan Berbasis Masyarakat.....	63
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
5.1. Kesimpulan.....	69
5.3. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	75



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal
1.	Rincian Aktivitas Penelitian	20
2.	Jumlah Penduduk Desa Gili Ketapang berdasar Pekerjaan	34
3.	Gambaran Budaya Lokal Pulau Gili dalam Tabel	50
4.	Gambaran Syarat Kearifan Lokal sebagai Model Pengelolaan Pesisir	52

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal
1.	Kerangka Berfikir Penelitian	20
2.	Gambar Peta Kabupaten Probolinggo	30
3.	Foto Pulau Gili dengan Pencitraan	31
4.	Sketsa beberapa Model Rumpon	43
5.	Penanda Rumpon di Laut	43
6.	Lokasi Andun Masyarakat Nelayan Pulau Gili	47
7.	Gambaran Keterkaitan Aspek Sosial, Ekonomi dan Lingkungan	57



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Hal
1.	Tabel 1. Produksi perikanan tangkap tiap jenis ikan, harga dan nilai produksinya tahun 2011	75
2.	Gambar 1. Gapura selamat datang di pulau Gili Ketapang	77
3.	Gambar 2. Contoh tradisi Petik laut di Jawa Timur	77
4.	Gambar 3. Kapal nelayan dengan alat tangkap payang	78
5.	Gambar 4. Aktivitas perekonomian warga di dermaga	78
6	Gambar 5. Aktivitas pengolahan ikan teri warga pulau Gili	79
7	Gambar 6. Kantor desa	79
8	Gambar 6. Informan dan peneliti	80
9	Gambar 7. Perangkat desa	80
10	Tabel 2. Keterangan Penulisan	81

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Indonesia atau yang lebih dikenal dengan hindia-belanda pada era kolonial ini merupakan salah satu negara kepulauan dengan panjang garis pantainya yang kaya dan menjanjikan dari segi sumberdaya alam dan budaya. Hal ini tidak lepas dari banyaknya suku bangsa yang homogen dan berbeda di setiap pulau satu dengan yang lainnya. Bahkan dalam satu pulau, diversitas suku bangsa sangat beragam. Keberagaman suku di negara archipelagic ini memperkaya warisan budaya kita sebagai negara kepulauan.

Panjang pesisir di wilayah Indonesia yang menduduki pesisir terpanjang kedua setelah Kanada ini menyebabkan sektor perikanan merupakan potensi sumber daya alam yang menjanjikan dari negara ini yang perlu dijaga kelestariannya. Wilayah pesisir yang panjang disertai keaneka ragaman suku menyebabkan hampir disetiap pesisir Indonesia memiliki adat istiadat yang variatif. Adat istiadat masyarakat pesisir yang di dominasi oleh nelayan ini salah satunya adalah kearifan lokal atau *lokal wisdom*.

Peran dan status kearifan lokal sebagai hukum atau aturan yang dilaksanakan di wilayah-wilayah pesisir ini sangat penting mengingat dari sisi historinya yang didapatkan dalam proses yang sangat panjang dan diturunkan secara lisan oleh masyarakat secara turun menurun. Apalagi dari segi tujuan diterapkannya yaitu sebagai kontrol terhadap sifat manusia yang kebutuhan dan keinginannya tidak terbatas memungkinkan keberadaan kearifan lokal sangat mempengaruhi kelestarian lingkungan manusia sebagai tempat tinggal khususnya wilayah pesisir.

Kearifan lokal merupakan tata nilai kehidupan yang terwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya yang berbentuk religi, budaya ataupun adat istiadat yang umumnya dalam bentuk lisan dalam suatu bentuk sistem sosial suatu masyarakat. Keberadaan kearifan lokal dalam masyarakat merupakan hasil dari proses adaptasi turun menurun

dalam periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan yang biasanya didiami ataupun lingkungan dimana sering terjadi interaksi didalamnya.

Menurut Suhartini (2009) keanekaragaman pola-pola adaptasi terhadap lingkungan hidup yang ada dalam masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun temurun menjadi pedoman dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungannya yang diketahui sebagai kearifan lokal suatu masyarakat, dan melalui kearifan lokal ini masyarakat mampu bertahan menghadapi berbagai krisis yang menimpanya. Maka dari itu kearifan lokal penting untuk dikaji dan dilestarikan dalam suatu masyarakat guna menjaga keseimbangan dengan lingkungannya dan sekaligus dapat melestarikan lingkungannya. Bertahannya kearifan lokal di suatu tempat tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor yang akan mempengaruhi perilaku manusia terhadap lingkungannya.

Sedangkan menurut Ridwan (2007) Kearifan lokal atau sering disebut *local wisdom* dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Pengertian di atas, disusun secara etimologi, di mana wisdom dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi. Sebagai sebuah istilah, wisdom sering diartikan sebagai kearifan/kebijaksanaan. Lokal secara spesifik menunjuk pada ruang interaksi terbatas dengan sistem nilai yang terbatas pula. Sebagai ruang interaksi yang sudah didesain sedemikian rupa yang di dalamnya melibatkan suatu pola-pola hubungan antara manusia dengan manusia atau manusia dengan lingkungan fisiknya.

Di beberapa wilayah di tanah air sudah banyak kearifan lokal yang menjadi contoh dalam pengelolaan lingkungan yaitu salah satunya Panglima Laot, Awig-awig dan Mane'e. kearifan lokal tersebut diterapkan hampir turun menurun oleh masyarakat setempat misalnya untuk phanglima laot di Aceh dan awig-awig di Buleleng Bali dan keberadaannya sangat mempengaruhi kelestarian lingkungan setempat. Hal yang sangat kontras dengan

kondisi dimana saat ini budaya asing mulai masuk dengan pesat di era globalisasi modern seperti sekarang ini.

Globalisasi merupakan suatu masa dimana semua aspek kehidupan bergerak secara dinamis ke semua arah dan wilayah di muka bumi menggeser aspek kehidupan asli atau sebelumnya yang sudah ada secara perlahan-lahan. Globalisasi seperti saat seperti ini memang masa yang tidak bisa dihindarkan karena proses yang menyeluruh meskipun secara perlahan dan bertahap. Masuknya hal – hal baru dengan mudah ke dalam suatu negara, misalnya gaya hidup, budaya dan pemikiran akan sangat mudah diterima oleh masyarakat modern yang sangat dinamis ini. Kita ketahui pengaruh budaya barat yang sangat pesat seiring bertambahnya waktu yang sering kita sebut *westernisasi* sudah mulai kental terasa dalam keseharian budaya ketimuran kita. Hal ini sebenarnya cukup memprihatinkan jika kita mengingat kita sebagai bangsa besar yang kaya akan budaya ketimuran yang sangat luhur dan rasional, dibandingkan budaya barat yang masuk.

Masuknya budaya asing dalam kehidupan sehari-hari kita besar kecilnya sangat mempengaruhi budaya kita yang sudah mengakar dalam masyarakat kita. Seperti lunturnya secara perlahan suatu kearifan lokal dalam masyarakat khususnya masyarakat pesisir karena pengaruh budaya asing yang sangat pesat. Padahal kita ketahui keberadaan kearifan lokal yang sudah ada turun menurun justru sangat pro terhadap keberadaan kelestarian lingkungan khususnya masyarakat pesisir.

Sedangkan dikaji dari pandangan ajaran agama islam yang mengatakan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di atas bumi ini sudah barang wajib bahwa manusia harus menjaga kelestarian bumi tempat tinggalnya terlepas dari peran sebagai khalifah di bumi, tetapi juga dengan anggapan bahwa masih akan ada generasi-generasi berikut setelah kita yang akan mendiami bumi sehingga anak cucu kita menikmati bumi ciptaanNya layaknya kita menempatinnya seperti saat ini.

Menurut Nuruzaman (2007) Jika kita membaca Al-Qur'an, dipastikan akan banyak ditemukan ayat yang berbicara tentang air, udara dan tanah. Bahkan tidak kurang 95 ayat yang berbicara tentang lingkungan beserta larangan-larangan Allah untuk berbuat

kerusakan. Untuk menyebut di antaranya adalah Al-Baqarah/2:11, 12, 27, 30, 60, 220, 251; Ali Imran/3: 63; Al-Maidah/5: 64; dan Al-A'raf/7:56, 74, 85, 86, 103, 127, 142. Demikian pula hadist-hadist Nabi yang berbicara tentang lingkungan hidup juga tidak sedikit.

Menurut Nasruddin (2007) Islam adalah agama yang komprehensif (*syaamil*), sempurna (*kaamil*) dan menyempurnakan semua sistem yang lain (*mutakaamil*). Islam mengatur semua sisi kehidupan manusia. Islam adalah sistem hidup yang diturunkan oleh Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, hal ini didasarkan pada firman Allah swt : “Pada hari ini Aku sempurnakan bagimu agamamu dan Aku cukupkan atasmu nikmatku, dan Aku ridhai Islam sebagai aturan hidupmu” (5: 3). Oleh karena itu, aturan Islam haruslah mencakup semua sisi yang dibutuhkan oleh manusia dan kehidupannya. Demikian tinggi, indah dan terperinci aturan Sang Maha Rahman dan Rahim ini, sehingga bukan hanya mencakup bagi sisi sesama manusia saja, melainkan juga terhadap alam dan lingkungan hidupnya.

Masyarakat pesisir pulau Gili dengan mayoritas mata pencaharian nelayan dengan basis warganya beragama islam sangat memungkinkan adanya kearifan lokal dengan dasar agama islam yang bisa digunakan sebagai profil kearifan lokal asli dipesisir pulau gili sebagai acuan dalam pengelolaan masyarakat yang pro terhadap lingkungan. Sehingga dalam kehidupan masyarakat di Pulau Gili jalannya perekonomian, agama dengan kelestarian lingkungan bisa berjalan beriringan tanpa ada salah satu yang tersisih.

Dari uraian-uraian diatas perlu diadakannya sebuah penelitian tentang kajian profil kearifan lokal masyarakat pesisir pulau gili kabupaten Probolinggo pada masyarakat nelayan pulau Gili kecamatan Sumber Asih Kabupaten Probolinggo.

1.2 Rumusan Masalah

Masyarakat nelayan pulau Gili Ketapang dengan segala kondisi yang ada, seperti agama islam sebagai agama mayoritas dan kondisi geografis yang soliter dari kabupaten Probolinggo, kemudian dari suku mayoritas yaitu suku Madura yang mendiami pulau Gili

Ketapang sejak lama berhadapan dengan perkembangan zaman yang sangat cepat meskipun tanpa melupakan dan menerapkan budaya-budaya asli masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi kondisi dimana kearifan lokal masyarakat pesisir Pulau Gili Ketapang dapat diangkat menjadi suatu budaya lokal yang masih bertahan dan dipraktikkan oleh masyarakat meskipun dalam perkembangan jaman yang sangat dinamis dan sangat terpengaruh budaya asing. Maka dari itu profil kearifan lokal masyarakat pesisir Pulau Gili Ketapang masih harus dipelajari dan dipahami lagi sebagai budaya lokal masyarakat pesisir pulau Gili dengan potensi sebagai kearifan lokal.

Sehingga jika diperinci lagi dari uraian diatas, rumusan masalah adalah sebagai berikut ;

1. Nilai-nilai kearifan lokal apa saja yang terdapat pada masyarakat pesisir pulau Gili di Kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimana eksistensi kearifan lokal di masyarakat pulau Gili?
3. Apa fungsi dan manfaat kearifan lokal yang ada di masyarakat pulau Gili?
4. Bagaimana membangun model penegelolaan berbasis kearifan lokal masyarakat ?

1.3 Tujuan penelitian

1. Mendeskripsikan nilai-nilai kearifan lokal apa saja yang terdapat pada masyarakat pesisir Pulau Gili Kabupaten Probolinggo.
2. Menjelaskan respon dan ketaatan masyarakat terhadap kearifan lokal di Pulau Gili.
3. Menjelaskan fungsi dan manfaat kearifan lokal yang ada di masyarakat Pulau Gili.
4. Menjelaskan bagaimana membangun model pengelolaan berbasis kearifan lokal masyarakat

1.4 Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

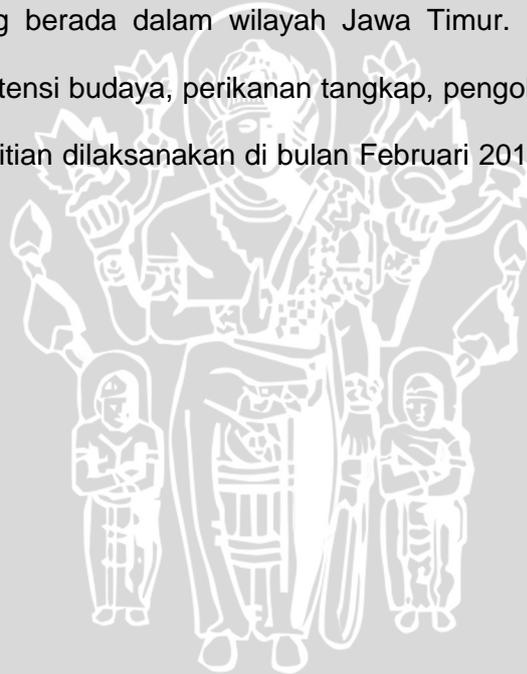
1. Peneliti maupun lembaga akademik; sebagai pengembangan ilmu dan penelitian lebih lanjut mengenai kearifan lokal masyarakat pesisir pulau Gili Kabupaten

Probolinggo dan juga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi peneliti tentang kondisi masyarakat nelayan di Pulau Gili.

2. Pemerintah dan instansi setempat yang terkait: sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan tentang perbelakuan peraturan daerah dengan kearifan lokal asli masyarakat pesisir Pulau Gili Ketapang. Selain itu, penelitian ini juga dan dapat sebagai bahan pertimbangan untuk mengelola dan memberdayakan potensi perikanan, budaya/tradisi maupun sumberdaya manusia khususnya nelayan.

1.5 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Pulau Gili Ketapang, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo yang berada dalam wilayah Jawa Timur. Penentuan lokasi ini karena Pulau Gili memiliki potensi budaya, perikanan tangkap, pengolahan hasil perikanan yang melimpah. Waktu penelitian dilaksanakan di bulan Februari 2012 dalam kurun waktu tujuh hari.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Wilayah Pesisir

2.1.1 Pengertian Wilayah Pesisir

Menurut Stanis (2005) Kawasan pesisir merupakan wilayah peralihan antara daratan dan perairan laut. Secara fisiologi didefinisikan sebagai wilayah antara garis pantai hingga ke arah daratan yang masih dipengaruhi pasang surut air laut, dengan lebar yang ditentukan oleh kelandaian pantai dan dasar laut, serta dibentuk oleh endapan lempung hingga pasir yang bersifat lepas dan kadang materinya berupa kerikil. Ruang kawasan pesisir merupakan ruang wilayah diantara ruang daratan dengan ruang lautan yang saling berbatasan. Ruang daratan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan termasuk perairan darat dan sisi darat dari garis terendah. Ruang lautan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut dimulai sisi laut pada garis laut terendah, termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya.

Menurut para pakar-pakar di Indonesia dalam Tuwo (2011) batas wilayah pesisir sebagai wilayah di mana daratan berbatasan dengan laut. Batas didaratan meliputi daerah-daerah yang tergenang air maupun tidak tergenang air yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti pasang surut, angin laut dan intrusi air laut. Sedangkan batas dilaut adalah sampai pada daerah laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami didaratan seperti sedimentasi dan titik terjauh aliran air tawar kelaut, serta daerah-daerah yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia didaratan.

Wilayah pesisir yang sangat luas dan saling terkait dengan wilayah daratan mengakibatkan wilayah pesisir sangat rentan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pencemaran yang berasal dari industri, limbah pertanian yang ada didaratan maupun limbah domestik dari daratan pula ataupun dari limbah domestik masyarakat pesisir atau nelayan itu sendiri. Penurunan kualitas atau yang sering disebut degradasi lingkungan merupakan ancaman yang hampir terjadi di wilayah pesisir negara-

negara berkembang karena meningkatnya pembangunan dari daratan hingga wilayah pesisir. Hal ini mengakibatkan beberapa masalah lagi seperti rusaknya keanekaragaman hayati seperti hutan mangrove, terumbu karang dan biota-biota diperairan pantai yang merupakan sumber daya dengan nilai ekonomis bagi masyarakat pesisir.

2.1.2 Ciri dan Kondisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir

Masyarakat pesisir didefinisikan sebagai masyarakat yang mendiami wilayah pesisir dengan mata pencaharian yang dominan dengan bergantung pada alam sekitar yaitu memanfaatkan sumber daya perikanan. Kondisi sumberdaya alam khususnya sumberdaya perikanan yang kaya dan potensial pada kenyataannya memang sangat berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir yang sangat miskin dilihat secara umum. Kemiskinan nelayan memang merupakan permasalahan yang sangat kompleks mulai dari faktor rendahnya pendidikan, struktur sosial yang memang terbangun sejak awal hingga ketergantungan masyarakat nelayan akan faktor alam yang tidak menentu atau tidak pasti.

Menurut Nijikuluw (2003) dalam Tuwo (2011) yang dimaksud masyarakat nelayan adalah kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir. Sedangkan dari sisi usaha perikanan selanjutnya menurut Tuwo kelompok masyarakat pesisir yang miskin terdiri dari rumah tangga perikanan yang menangkap ikan tanpa motor, dan perahu bermotor tempel yang dengan skala seperti ini, nelayan hanya mampu menangkap ikan disekitar pantai saja. Sedangkan dalam kondisi nelayan yang lain ada pula yang berkerja sama dengan pemilik modal ataupun pemilik kapal.

Kondisi ketidak pastian yang dialami masyarakat nelayan secara umum memang karena ketergantungan dengan alam. Kondisi alam yang tidak menentu menyebabkan penghasilan yang juga tidak tetap disamping kebutuhan ekonomi yang terus berjalan dan cenderung meningkat. Stanis (2005) menjelaskan karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan karakteristik masyarakat agraris karena perbedaan sumberdaya yang mereka

hadapi atau miliki. Masyarakat agraris menghadapi sumberdaya yang terkontrol yakni lahan untuk memproduksi suatu jenis komoditas dengan hasil yang dapat diprediksi. Dengan sifat yang demikian memungkinkan tetapnya lokasi produksi sehingga menyebabkan mobilitas usaha yang relatif rendah dan faktor resiko pun relatif kecil.

Menurut Susilo, *et al* (2009) menjelaskan bahwa dalam masyarakat nelayan terdapat dua lapisan masyarakat, yaitu lapisan atas yang serba berkecukupan dan lapisan bawah yang selalu hidup kekurangan. Dijelaskan bahwa struktur lapisan ini menyerupai piramida dengan posisi terbalik, dengan kondisi dimana bagian atas adalah nelayan dengan kondisi selalu hidup kekurangan.

2.1.3 Kelembagaan dalam masyarakat Nelayan

Lembaga secara umum diartikan sebagai kumpulan beberapa orang dalam bentuk kerja sama yang terwadahi oleh suatu organisasi. Menurut Horton dan Hunt (1993) dalam Tuwo (2011) lembaga diartikan sebagai suatu sistem hubungan sosial yang terorganisir untuk mewujudkan nilai-nilai dan tata cara tertentu, serta untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Masyarakat pesisir adalah kelompok masyarakat yang dalam mempertahankan hidupnya selalau bergantung pada alam yaitu sumberdaya pesisir dan laut yang ada disekitarnya. Sejak dahulu masyarakat pesisir dan kepulauan sudah menjalankan aktivitasnya berdasarkan pola kerjasama tradisional, dimana setiap daerah mempunyai sistem yang berbeda-beda (Tuwo, 2011)

Kondisi masyarakat pesisir yang tergantung dengan sumberdaya alam yang komunal atau *common property* mengakibatkan terbentuknya komunitas-komunitas atau lembaga yang didalamnya terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi sesama anggota dari komunitas itu sendiri. Aturan tersebut dengan sendirinya mengikat dan sifatnya terbentuk secara bertahap dengan sendirinya akibat adanya interaksi sosial yang terjadi dalam waktu yang lama.

Meurut Satria (2002) dan Pranadji (1995) dalam Susilo, *et al* (2009) lebih lanjut menjelaskan bahwa hubungan patron-client merupakan ciri struktur sosial dalam masyarakat nelayan. Pola seperti terjadi akibat dari adanya ketidakpastian akan sumberdaya yang bersifat komunal. *Patron-client* merupakan sebuah kelembagaan yang mampu memberikan jaminan sosial-budaya yang disebabkan oleh adanya perikanan tangkap yang modern yang sering disebut kemitraan tradisional.

2.1.4 Pemberdayaan Kelembagaan Lokal

Upaya pengelolaan sumberdaya kelautan tidak bisa melepaskan diri dari keterlibatan lembaga-lembaga sosial lokal. Bukan berarti harus membuat lembaga baru, tetapi memberdayakan dan mengfungsikan lembaga yang ada agar berfungsi secara maksimal sesuai dengan karakteristik masing-masing. Lembaga yang ada bisa berupa lembaga adat, lembaga agama, dan lembaga ekonomi. Lembaga-lembaga sosial pada prinsipnya merupakan media yang cukup efektif untuk mengatur masyarakat dalam melakukan serangkaian program. Maka dari itu penting untuk mengaktifkan kembali peran dari kelembagaan lokal (BPP-PSPL UNRI, 2007).

Menurut Tuwo (2011) masyarakat pesisir dan kepulauan yang umumnya nelayan dapat memiliki prasarana yang memungkinkan mereka berinteraksi, sehingga membentuk ikatan yang mempersatukan mereka menjadi suatu kelompok masyarakat yang pola tingkah laku kehidupannya bersifat khas, mantap dan berkesinambungan sebagai adat istiadat. Lemahnya kondisi kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat pesisir kepulauan mengharuskan pemerintah melakukan penguatan kelembagaan terfokus pada tiga unsur utama, yaitu : (1) aturan dan prosedur, (2) organisasi dan (3) sumberdaya.

2.1.5 Pengertian Kearifan lokal

Kearifan lokal adalah salah satu dari respon suatu masyarakat dalam proses adaptasinya di suatu lingkungan guna menentukan suatu sikap atau perilaku dalam keseharian hidupnya yang cocok dan tepat dalam lingkungan itu dan terhadap sesama

anggota dalam masyarakat. Sikap dan perilaku ini terwujud dalam bentuk aturan, hukum adat, atau norma yang berlaku sebagai batasan dan acuan dalam berkehidupan sehari-hari. Kearifan lokal terbentuk karena adanya kesadaran akan kelestarian lingkungan atau menjaga keharmonisan antar sesama.

Pengertian kearifan lokal menurut Keraf (2002) dalam Stanis (2005) adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Dijelaskan pula bahwa kearifan lokal/tradisional bukan hanya menyangkut pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik di antara manusia, melainkan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan bagaimana relasi di antara penghuni komunitas ekologis ini harus dibangun.

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa masing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat "*local wisdom*" atau pengetahuan setempat "*local knowledge*" atau kecerdasan setempat "*local genius*" (Tumanggor,2007).

Menurut Ridwan (2007) secara substansial, kearifan lokal itu adalah nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah-laku sehari-hari masyarakat setempat. Kemudian Greertz mengatakan bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Lima Hal itu berarti kearifan lokal yang di dalamnya berisi unsur kecerdasan kreativitas dan pengetahuan lokal dari para elit dan masyarakatnya adalah yang menentukan dalam pembangunan peradaban masyarakatnya.

Praktek pengelolaan perikanan berbasis pengetahuan lokal/adat (lokal/customary knowledge), menurut Ruddle (2000), paling tidak memiliki empat ciri umum yaitu:

- a. Praktek ini sudah berlangsung lama, empiris dan dilakukan di suatu tempat (spesifik terhadap lokasi tertentu), mengadopsi perubahan-perubahan lokal, dan dalam beberapa hal sangat detail;
- b. Praktek ini bersifat praktis, berorientasi pada perilaku masyarakat, tidak jarang spesifik untuk tipe sumberdaya dan jenis ikan tertentu yang dianggap sangat penting;
- c. Praktek ini bersifat struktural, memiliki perhatian yang kuat (*strong awareness*) terhadap sumberdaya dan lingkungan sehingga dalam beberapa hal sesuai dengan konsep-konsep ilmiah ekologis dan biologis, misalnya dalam konteks konektivitas ekologis dan konservasi sumberdaya perairan;
- d. Praktek ini sangat dinamik sehingga adaptif terhadap perubahan dan tekanan-tekanan ekologis (*ecological perturbations*), dan kemudian mengadopsi adaptasi terhadap perubahan tersebut ke dalam inti dari pengetahuan lokal yang menjadi basis bagi pengelolaan perikanan.

2.1.6 Syarat - syarat pengelolaan hak guna wilayah perikanan berbasis Kearifan Lokal

Memurut beberapa ahli, kearifan lokal dibedakan dengan budaya dalam suatu masyarakat tertentu. Umumnya kearifan lokal memiliki efek secara langsung terhadap kelestarian lingkungan yang didiami masyarakat yang memiliki kearifan tersebut. Secara turun-temurun dan secara tradisional kearifan lokal tersebut sudah ada untuk mencegah akses yang terlalu terbuka yang tentunya dengan konsekuensi merusak apabila eksploitasi dengan mudah dilakukan karena akses yang terbuka.

Menurut Chirsty (1992) ada enam hal yang harus dipenuhi sebagai syarat sebagai suatu kearifan lokal dalam suatu wilayah. Diantaranya :

- a) Kondisi sumberdaya alam harus memiliki karakteristik yang jelas. Misal berupa terumbu Karang atau ekosistem mangrove.

- b) batas-batas wilayah yang dimiliki harus jelas dan sudah ditentukan sebelumnya. Misalnya sejauh mana kita boleh menangkap ikan.
- c) Teknologi penangkapan. Harus ditentukan jenis alat dan jenis tangkapan yang akan diatur dalam kearifan lokal.
- d) Budaya, budaya setempat harus sesuai dengan permodelan pemberdayaan kearifan lokal sehingga tidak akan terjadi benturan
- e) Distribusi kekayaan. Harus melindungi model kelembagaan yang sudah ada karena masih adanya politik alam dimana yang kuat akan bertahan
- f) Otoritas pemerintah dan lembaga terkait. Kewenangan dan ketegasan pemerintah juga harus mampu membuat keputusan yang harus diintegrasikan dengan lembaga-lembaga lain yang terkait.

2.1.7 Beberapa contoh Kearifan lokal.

Beberapa kearifan lokal yang sudah sering terekspos dan diteliti memang sudah sangat banyak dan beragam dari ujung barat sampai ujung timur di Indonesia. Dari bermacam-macam kearifan lokal tersebut ada yang diterapkan di wilayah pesisir seperti hukum adat panglima lhaot atau di wilayah bukan pesisir (daratan).

Sifatnya yang turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Hal ini menjelaskan bahwa kearifan lokal tidak terbentuk dengan cepat atau kurun waktu yang sebentar, melainkan dalam periode yang cukup lama. Menurut Stanis (2005) Aturan-aturan/tradisi masyarakat ini diwarisi secara turun temurun yang disebut juga sebagai hukum adat dan berlaku bagi masyarakat pesisir. Kenyataannya, nilai-nilai kearifan lokal dan hukum adat tersebut cukup efektif dalam pengelolaan sumberdaya alam kelautan dan perikanan, dan menjaga pelestarian ekosistem laut dari berbagai aktivitas yang bersifat destruktif dan merusak.

- a. Tradisi/Hukum adat Laot di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam

Dari segi nama, gelar panglima untuk pimpinan lembaga adat laot merupakan sebuah keistimewaan tersendiri. Setidaknya dari gelar tersebut sudah mencerminkan

jabatan yang sarat dengan kekuasaan dan jabatan. Ini memang dapat dibuktikan dalam peran kesehariannya, tegas, bahkan harus bersikap keras dalam mengambil setiap keputusan. Tidak ada keterangan yang pasti sejak kapan lembaga Panglima Laot masuk ke dalam sistim adat Aceh. Menurut beberapa sumber, lembaga ini sudah lama berkembang sejalan dengan perjalanan era kesultanan di Aceh dimana salah satu pendukung perangkat pemerintahan adalah lembaga adatnya.

Menurut Stanis (2005) Hukum Adat Laot merupakan hukum-hukum adat yang diperlukan masyarakat nelayan dalam menjaga ketertiban yang meliputi penangkapan ikan, pemeliharaan sumberdaya ikan dan biota laut lainnya, dan menjaga kehidupan masyarakat nelayan yang hidup di wilayah pantai. Secara hukum, Hukum Adat *Laot* bersifat tertutup, artinya tidak dapat dihilangkan dalam struktur pemerintahan di Aceh sehingga memiliki kekuatan dan kewenangan tertentu dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, Hukum Adat *Laot* di Aceh dapat bersifat terbuka, artinya, dalam menerapkan Hukum Adat *Laot* tersebut senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Hukum Adat *Laot* dari segi Adat Pemeliharaan Lingkungan meliputi:

- Dilarang melakukan pemboman, peracunan dan pembiusan, penyetroman dengan alat listrik, pengambilan terumbu karang, dan bahan-bahan lain yang dapat merusak lingkungan hidup dan biota lainnya.
- Dilarang menebang/merusak pohon-pohon kayu di pesisir dan pantai seperti pohon arun (cemara), pandan, ketapang, bakau dan pohon lainnya.
- Dilarang menangkap ikan/biota lainnya yang dilindungi seperti lumba-lumba dan penyu.

b. Adat Sasi di Maluku

Adat Sasi dapat diartikan sebagai larangan untuk mengambil hasil sumberdaya alam tertentu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan keberlanjutan populasi sumberdaya hayati (hewani maupun nabati) alam tersebut.

Karena peraturan-peraturan dalam pelaksanaan larangan ini juga menyangkut pengaturan hubungan manusia dengan alam dan antar manusia dalam wilayah yang dikenakan larangan tersebut, maka sasi, pada hakekatnya adalah norma hukum adat yang berlaku di Pulau Haruku, juga merupakan suatu upaya untuk memelihara tata-krama hidup bermasyarakat, termasuk upaya ke arah pemerataan pembagian atau pendapatan dari hasil sumberdaya alam sekitar kepada seluruh warga / penduduk setempat.

c. Tradisi Awig-awig di Lombok barat, NTB

Awig-awig merupakan aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan masyarakat, untuk mengatur masalah tertentu, dengan maksud memelihara ketertiban dan keamanan dalam kehidupan masyarakat. Dalam *awig-awig* diatur perbuatan yang boleh dan yang dilarang, sanksi serta orang atau lembaga yang diberi wewenang oleh masyarakat untuk menjatuhkan sanksi.

Adanya pengaturan lokal (*awig-awig*) dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan dipengaruhi oleh masalah pokok yaitu konflik antar nelayan. Apapun munculnya konflik dalam kegiatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dipengaruhi oleh rusaknya lingkungan (ekologi), penambahan penduduk (demografi), lapangan pekerjaan yang semakin sedikit (mata pencaharian), lingkungan politik lokal, perubahan teknologi dan perubahan pasar.

Sejak dulu, masyarakat Lombok Barat telah mengenal aturan yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam, baik yang ada di darat maupun di laut. Hal ini tercermin dari kebiasaan adat istiadat, yaitu upacara *Sawen*. Secara umum *sawen* adalah larangan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang berlaku di zona dan waktu yang sudah ditetapkan sebelumnya melalui kesepakatan-kesepakatan lokal.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian skripsi ini dilaksanakan di Pulau Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo yang termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Pulau Gili Ketapang dipilih karena di wilayah ini merupakan wilayah pesisir dengan sebagian besar penduduknya bermata-pencarian sebagai nelayan. Usaha perikanan yang dominan di Pulau Gili yaitu perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan dalam skala kecil.

Kondisi alam yang dominan oleh wilayah perairan pantai mengakibatkan mata pencaharian masyarakat di Pulau Gili banyak yang menggantungkan hidupnya kepada potensi perikanan yang ada disekitar Pulau Gili. Nelayan di pulau tersebut banyak yang menggunakan alat tangkap payang dan sebagian kecil dengan jaring dan pancing. Atas pertimbangan kondisi-kondisi tersebut, peneliti menentukan lokasi penelitian di pulau Gili, dalam hal ini tentang kearifan lokal masyarakat pesisir Pulau Gili yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan penelitian skripsi ini di bulan Februari 2012.

3.2 Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah seluruh lapisan masyarakat pesisir yang ada di Pulau Gili khususnya nelayan tradisional. Penelitian tentang kearifan lokal masyarakat nelayan ini fokus pada kondisi etnografi pesisir Pulau Gili, kearifan lokal yang ada dalam masyarakat, respon masyarakat terhadap kearifan lokal tersebut, serta eksistensi kearifan lokal dalam masyarakat Pulau Gili.

3.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diperoleh, maka dalam matrik tabel dibawah ini akan diuraikan secara detail tentang fokus penelitian beserta aspek yang terkait dan sesuai dengan tujuan dalam aktivitas penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian aktivitas penelitian

FOKUS PENELITIAN	DATA YANG DIBUTUHKAN	RESPONDEN
1. Kearifan lokal yang ada dalam masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Informasi mengenai beberapa kearifan lokal yang masih ada di pulau Gili 	Tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat pulau Gili
2. Respon masyarakat terhadap kearifan lokal	<ul style="list-style-type: none"> Bagaimana respon masyarakat terhadap kearifan lokal yang ada dipulau gili beserta apresiasinya 	Tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat pulau Gili
3. eksistensi kearifan lokal pada masyarakat pulau Gili	<ul style="list-style-type: none"> informasi bagaimana eksistensi kearifan lokal di pulau gili dan seberapa berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari 	Tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat pulau Gili
4. fungsi dan manfaat kearifan lokal yang ada di masyarakat pulau Gili.	<ul style="list-style-type: none"> Mengetahui pengaruh, fungsi dan manfaat kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pulau Gili. 	Tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat pulau Gili

Pada penelitian ini jumlah responden yang diambil oleh peneliti mengikuti beberapa informasi yang didapatkan. Misalnya, pada saat wawancara dengan tokoh masyarakat, ketika data dan informasi yang didapatkan sudah dianggap valid dan mewakili jawaban dari beberapa informasi maka sudah dianggap valid. Pada peneltiian ini wawancara dilakukan dengan satu perangkat desa, satu tokoh masyarakat, dan lima nelayan masyarakat pulau Gili ketapang.

3.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan studi kasus dengan pendekatan studi ethnographic. Metode ini digunakan Karena berkaitan dengan kajian kearifan lokal yang menggunakan data-data dari informan. Menurut Suharto (1993) dalam Masri (2010) tujuan penelitian deskriptif adalah untuk

memuat gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki

Metode penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*) dan data yang dikumpulkan bersifat kualitatif. Metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu (Usman dan Akbar, 2006).

Menurut Moleong (2004) penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan berupa kata-kata dan bukan dalam angka. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan pengertian tentang individu dan kejadian dengan memperhitungkan konteks yang relevan. Sedangkan tujuan penelitian kualitatif yaitu untuk memahami fenomena social melalui gambaran holistic dan memperbanyak pemahaman mendalam.

Menurut Yin (2009) studi kasus dipergunakan secara luas dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, baik pada disiplin-disiplin tradisional (psikologi, sosiologi, ilmu politik dan antropologi). Studi kasus juga sering dipergunakan sebagai penelitian berkaitan dengan studi perencanaan wilayah, administrasi public, kebijakan umum dan ilmu manajemen. Studi ini akan sangat cocok dengan suatu penelitian yang berkenaan dengan *how* atau *why*. Sehingga studi kasus juga digunakan sebagai metode penelitian untuk melengkapi metode deskriptif kualitatif.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan etnografi. Menurut Sukmadinata (2006) dalam Mardoyo (2008) Studi etnografi (*ethnographic studies*) mendeskripsikan dan menginterpretasikan budaya, kelompok sosial atau sistem. Meskipun makna budaya itu sangat luas, tetapi studi etnografi biasanya dipusatkan pada pola-pola kegiatan, bahasa, kepercayaan, ritual dan cara-cara hidup. Etnografi adalah pendekatan empiris dan teoretis yang bertujuan mendapatkan deskripsi dan analisis mendalam tentang

kebudayaan berdasarkan penelitian lapangan (*fieldwork*) yang intensif. Seorang etnografer memfokuskan perhatiannya pada detail-detail kehidupan lokal dan menghubungkannya dengan proses-proses sosial yang lebih luas.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Proses ini berlangsung dengan proses: (1) mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri; (2) mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan; (3) berpikir, membuat penjelasan, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

3.5 Teknik Pengambilan Data

Bukti, data atau informasi yang sangat diperlukan dalam suatu penelitian bisa didapatkan dari berbagai cara dan sumbernya. Kemudian dari berbagai sumber dan cara mendapatkannya, kesemua data, bukti atau informasi akan saling mendukung dan saling menguatkan karena pasti sudah akan ditentukan sebelumnya data apa saja yang dibutuhkan dan sumber untuk mendapatkannya sehingga tidak akan meleset dan data yang didapat akan semakin berguna. Teknik-teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian diantaranya adalah sebagai berikut :

A. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan interaksi dua arah antara penanya dan narasumber, narasumber bisa berjumlah lebih dari satu. Menurut Mikkelsen (2003) dalam Stanis (2005), mengemukakan wawancara semiterstruktur secara mendalam dapat dilaksanakan dengan menggunakan empat cara yakni:

- a. Wawancara Individual: wawancara ini dilaksanakan dalam suatu kesempatan pengambilan sampel atas responden yang dipilih dengan sengaja untuk memperoleh informasi atau data yang representatif.

- b. Wawancara dengan informan kunci/tokoh-tokoh kunci (*Key informan/key persons*); wawancara dengan *key informan/key persons* bertujuan untuk mendapatkan informasi khusus yang berkaitan pengetahuan dan pemahaman terhadap kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam laut dan pesisir.
- c. Wawancara Kelompok; dengan cara terstruktur dan tidak terstruktur. Teknik ini lebih memberikan akses pada sosok pengetahuan yang lebih besar dan secara mendalam tentang informasi dan data.

Menurut Yin (2002) wawancara bisa mengambil beberapa bentuk. Yang paling umum, wawancara studi kasus bertipe open-ended, dimana peneliti dapat bertanya kepada responden kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa disamping opini mereka mengenai peristiwa yang ada. Pada beberapa situasi, peneliti bahkan bisa meminta responden untuk menyetujui pendapatnya sendiri terhadap peristiwa tertentu dan bisa menggunakan proposisi tersebut sebagai dasar penelitian selanjutnya.

Menurut Mikkelsen (2003) dalam Stanis (2005) wawancara merupakan salah satu teknik penting dalam studi-studi pembangunan. Dalam wawancara terjadi percakapan sekalipun percakapan tetap dalam pengendalian dan terstruktur. Teknik ini lebih dikenal sebagai wawancara semi-terstruktur (*semi structured interview*) yakni wawancara yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang diharapkan diikuti dengan pertanyaan lanjutan untuk lebih menggali informasi dan secara lebih mendalam.

B. Observasi

Menurut Yin (2002) dengan membuat kunjungan lapangan terhadap situs studi kasus, peneliti menciptakan kesempatan untuk observasi langsung. Dengan berasumsi bahwa fenomena yang diminati tidak asli historis, beberapa pelaku atau kondisi lingkungan sosial yang relevan akan tersedia untuk observasi. Observasi semacam itu berperan sebagai sumber bukti lain suatu studi kasus. Pengamatan

langsung dilakukan tanpa menggunakan alat bantu melainkan dengan indera kita dengan mengikuti kegiatan langsung di lapang.

Observasi atau pengamatan baru tergolong sebagai teknik mengumpulkan data, jika pengamatan tersebut mempunyai kriteria sebagai berikut: (1) pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara sistematis; (2) pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan; (3) pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu set yang menarik perhatian saja; (4) pengamatan dapat dicek dan dikontrol atas validitas dan reliabilitasnya (Nazir, 2005).

Sedangkan menurut Stanis (2005) Teknik observasi dilakukan untuk mendapatkan data dengan mengamati potensi sumberdaya alam pesisir yang terdapat di pulau Gili terutama pada wilayah sampel. Potensi yang akan diamati adalah kondisi umum perairan menyangkut kualitas perairan, keadaan vegetasi mangrove, lamun dan terumbu karang.

C. Dokumentasi

Penggunaan dokumen tentunya akan relevan dalam suatu penelitian meskipun keabsahan dan keakuratannya belum tentu barang pasti, tetapi setidaknya ada kekuatan dibalik suatu dokumen dan pastinya juga akan sangat berpengaruh dilihat darimana dokumen tersebut didapatkan. Jenis-jenis dokumentasi menurut Yin (2002), yaitu :

- Surat, memorandum, dan pengumuman resmi;
- Agenda, kesimpulan-kesimpulan pertemuan, dan laporan-laporan peristiwa tertulis lainnya;
- Dokumen-dokumen administratif-proposal, laporan kemajuan, dan dokumen-dokumen intern lainnya;
- Penelitian-penelitian atau evaluasi-evaluasi resmi pada situs yang sama;

- Kliping-kliping baru dan artikel-artikel lain yang muncul di media massa.

D. Kuesioner

Alat lain untuk mengumpulkan data adalah daftar pertanyaan, yang sering disebutkan secara umum dengan nama kuesioner. Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner, atau daftar pertanyaan tersebut cukup terperinci dan lengkap. Ini yang membedakan daftar pertanyaan dengan *interview guide*. Jika yang menuliskan isian kedalam kuesioner adalah responden, maka daftar pertanyaan tersebut dinamakan kuesioner. Isi dari kuesioner adalah pertanyaan tentang fakta-fakta yang dianggap dikuasai oleh responden (Nazir, 2005).

Menurut Singarimbun dan Effendi (1995) tujuan pokok pembuatan kuesioner adalah untuk (a) memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan survai, dan (b) memperoleh informasi dengan reliabilitas dan validitas setinggi mungkin. Mengingat terbatasnya masalah yang dapat ditanyakan dalam kuesioner, maka senantiasa perlu diingat agar pertanyaan-pertanyaan memang langsung berkaitan dengan hipotesa dan tujuan penelitian tersebut.

E. Rekaman Arsip

Rekaman-rekaman arsip ini dan lainnya dapat digunakan bersama-sama dengan sumber-sumber informasi yang lain-lain dalam suatu penelitaian. Menurut Yin (2002) kegunaan rekaman arsip akan sangat bervariasi pada suatu penelitian, pada beberapa penelitian rekaman tersebut begitu penting sehingga bisa menjadi objek perolehan kembali analisis yang luas. Rekaman arsip bisa meliputi :

- Rekaman keorganisasian ;
- Peta dan bagan karakteristik geografis suatu tempat;
- Daftar nama dan komoditi lain yang relevan;
- Data survey, seperti rekaman atau data sensus yang terkumpul;

- Rekaman-rekaman pribadi, seperti buku harian, kalender.

3.6 Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Nasution (2003) Populasi adalah keseluruhan objek yang akan/ingin diteliti. Populasi ini sering juga disebut *Universe*. Anggota populasi dapat berupa benda hidup maupun benda mati, dimana sifat-sifat yang ada padanya dapat diukur atau diamati.

Sampel adalah sebagian dari suatu populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu dan karakteristik tertentu yang mewakili populasi tersebut. Sampel harus bersifat mewakili suatu populasi tertentu dengan jelas dan lengkap.

Sedangkan Alasan perlunya pengambilan sampel menurut Nasution (2003) adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan waktu, tenaga dan biaya.
2. Lebih cepat dan lebih mudah.
3. Memberi informasi yang lebih banyak dan dalam.
4. Dapat ditangani lebih teliti.

3.7 Jenis dan Sumber Data

3.7.1 Data Primer

Menurut Yusof (2004) data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan obyek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Data ini diperoleh secara langsung dengan melakukan pengamatan dan pencatatan dari hasil observasi dan wawancara.

Menurut Danim (2002) dalam Stanis (2005) Untuk memperoleh data primer maka dilakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dilakukan secara *purposive* dengan para informan atau responden yang dianggap paling banyak mengetahui semua

tentang kebiasaan, kearifan lokal dan adat istiadat yang dilakukan masyarakat pesisir pulau Gili dalam keseharian sebagai masyarakat pesisir yaitu pejabat Dinas Perikanan, Camat dan Kepala Desa serta berbagai instansi terkait.

3.7.2 Data Sekunder

Menurut Indriantoro dan Supomo (1998) dalam Widodo (2011) data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, misalnya dari Biro Pusat Statistik, sebuah majalah, surat kabar, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya. Untuk memperoleh data sekunder ini dapat diperoleh dari instansi yang terkait seperti Kantor Kepala Desa untuk mengetahui letak desa, peta desa, batas desa, mengetahui jumlah penduduk, potensi desa, fasilitas umum yang ada di desa tersebut, dan beberapa data lainnya yang mendukung penelitian, ataupun juga dari sumber beberapa literatur buku dan jurnal penelitian.

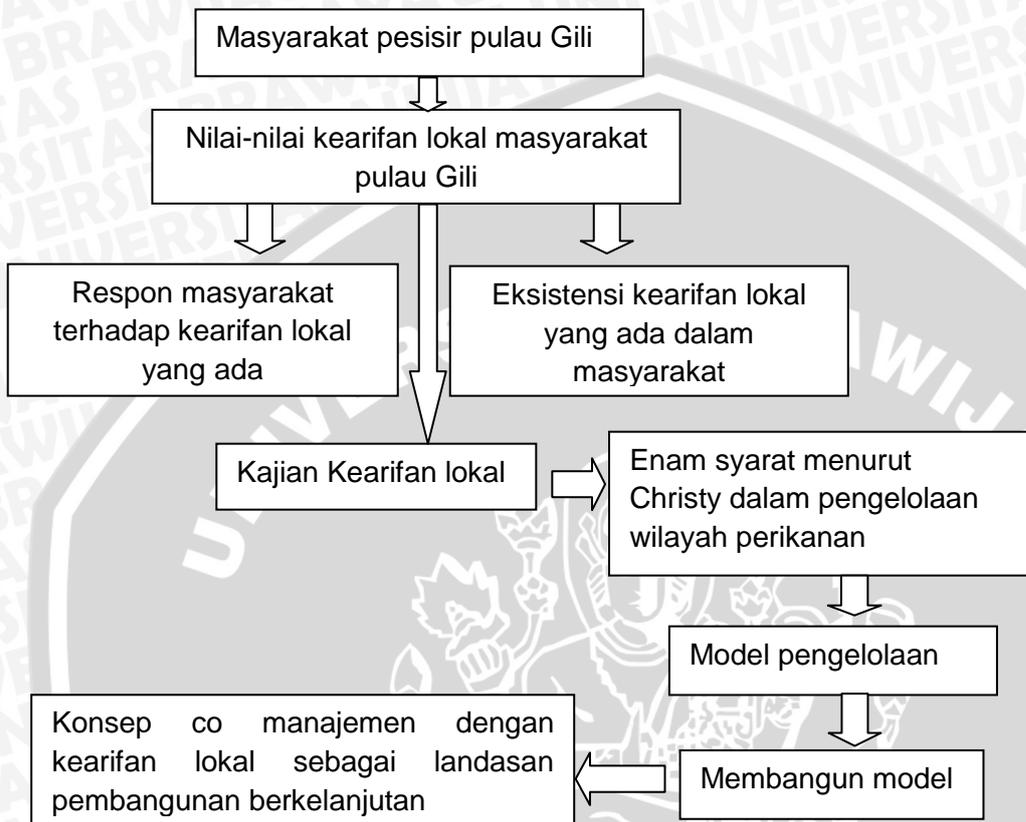
Data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan bukan untuk kepentingan studi yang sedang dilakukan saat ini tetapi untuk beberapa tujuan lain. Sedangkan, data primer merupakan informasi yang dikumpulkan terutama untuk tujuan investigasi yang sedang dilakukan (Hendri,2009).

3.8 Kerangka Berfikir

Masyarakat Pulau Gili sebagai objek penelitian dengan berbagai tradisi dan budaya yang ada, memiliki potensi sebagai kearifan lokal dalam pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal masyarakat. Kemudian bagaimana nilai-nilai yang terdapat dalam setiap tradisi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian respon dari masyarakat Pulau Gili disertai dengan eksistensinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dari kearifan lokal tersebut dikaji sebagai modal dasar dalam pembangunan masyarakat sengan mengacu pada enam syarat Christy (1992) dalam pengelolaan wilayah perikanan. Sehingga bisa ditentukan model yang bisa digunakan dan cocok dengan kondisi masyarakat Pulau Gili dan kemudian bagaimana membangun model pemberdayaan

masyarakat sehingga tercapai konsep co manajemen dengan kearifan lokal sebagai landasan pembangunan berkelanjutan. Jika dalam bentuk kerangka adalah sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka berfikir penelitian.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Letak Geografis Kabupaten Probolinggo

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur berada pada posisi lintang 112'50' – 113'30' Bujur Timur (BT) dan 7'40' – 8'10' Lintang Selatan (LS), dengan luas wilayah sekitar 169.616,65 Ha atau + 1.696,17 km² (1,07 % dari luas daratan dan lautan Propinsi Jawa Timur).

Gambar 2. Gambar Peta Kabupaten Probolinggo.



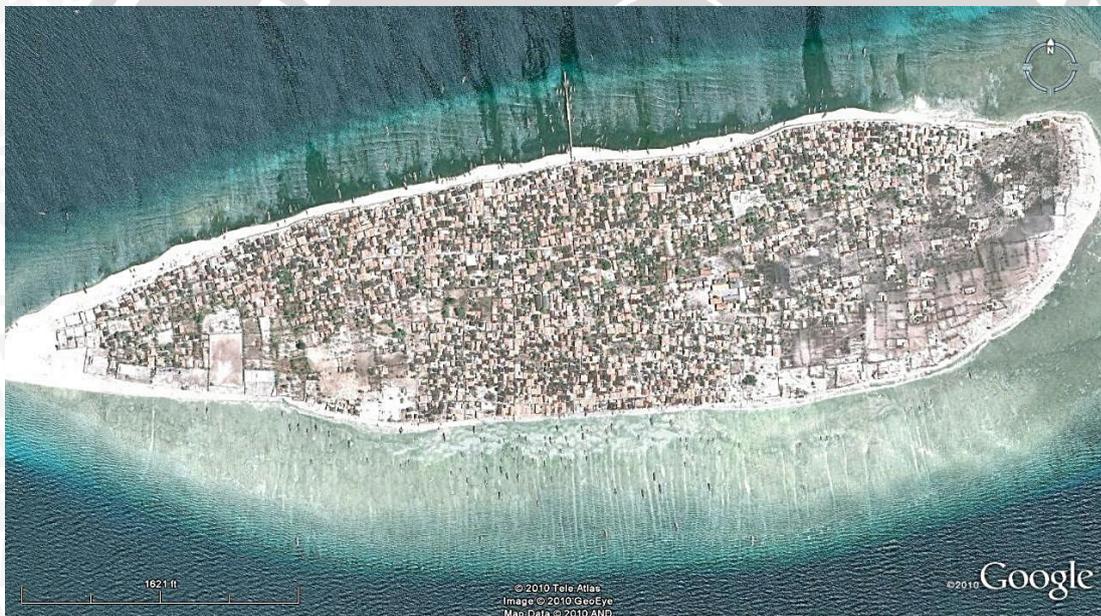
Dengan rincian luas wilayah sebagai berikut :

- Permukiman : 147,74 Km²
- Persawahan : 373,13 Km²
- Tegal : 513,80 Km²
- Perkebunan : 32,81 Km²
- Hutan : 426,46 Km²
- Tambak/Kolam : 13,99 Km²kehis
- Pulau Gili Ketapang : 0,60 Km²
- Lain-lain : 188,24 Km²

4.1.2 Kondisi Geografis dan Topografi Kecamatan Sumberasih

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sumber Asih yaitu tepatnya desa Gili Ketapang atau yang lebih terkenal dengan sebutan Pulau Gili, yang berada dalam kawasan daerah pemerintahan Kabupaten Probolinggo. Wilayah pulau ini termasuk desa yang masuk dalam kecamatan Sumber Asih. Jarak desa Gili Ketapang dengan kota Probolinggo berjarak kurang lebih 10-15 KM. Menurut pengalaman yang peneliti alami, desa Gili Ketapang ditempuh dengan perjalanan laut dengan perahu yang masyarakat pulau Gili sebut sebagai “kapal taxi” kurang lebih 45 menit normalnya dan jika ombak dilaut cukup besar, perjalanan laut bisa mencapai 60 menit yang perjalanannya dimulai dari pelabuhan Tanjung Tembaga.

Gambar 3. Foto pulau Gili dengan pencitraan



Sumber : Google Earth. 2010

Pulau Gili merupakan sebuah pulau yang tepat berada di sebelah utara Kabupaten Probolinggo. Kecamatan Sumberasih yang terletak dalam wilayah hukum Kabupaten Probolinggo berada di bagian barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Selat Madura dan Kota Probolinggo
- Timur : Kota Probolinggo

- Selatan : Kecamatan Wonomerto
- Barat : Kecamatan Tongas dan Lumbang

Dilihat dari ketinggian diatas permukaan air laut, Kecamatan Sumberasih berada pada ketinggian 10 sampai 50 meter, yakni terdiri dari dataran rendah dan sebagian dataran tinggi. Iklim di kawasan Kecamatan Sumberasih sebagaimana kecamatan lain di Kabupaten Probolinggo. Kecamatan Sumberasih beriklim tropis yang terbagi menjadi dua musim, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober sampai April dan musim kemarau pada bulan April sampai Oktober.

Sedangkan keadaan iklim umumnya ditinjau dengan indikator curah hujan adalah sebagai berikut:

- Curah hujan terbesar : 254 mm
- Curah hujan terkecil : 28 mm
- Jumlah hari hujan : 43 hari
- Curah hujan setahun : 893 mm

Temperatur udara di Kecamatan Sumberasih seperti kecamatan lainnya yang berketinggian 10-50 meter di atas permukaan air laut suhu udaranya relatif panas sebagaimana daerah dataran rendah pada umumnya yaitu antara 29 sampai 30° C.

Lokasi penelitian yang dilakukan berada di Gili Ketapang yang merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Sumberasih. Desa Gili Ketapang terletak di wilayah tepi pantai / pesisir dan merupakan dataran rendah, sehingga Desa Gili Ketapang mempunyai potensi perikanan yang cukup menjanjikan.

Menurut beberapa informan yang peneliti temui. Awal dari penduduk pulau Gili yang ada sampai sekarang merupakan pendatang yang berasal dari pulau Madura, tepatnta berasal dari Kabupaten Sampang. Sekilar awal tahun 1991 pendatang mulai berdatangan ke pulau Gili dengan kebanyakan bermata pencaharian sebagian besar nelayan karena dengan

alasan didaerah asal yaitu Kabupaten Sampang tidak berhasil dan mencoba peruntungan di sebuah pulau yang sebelumnya hanya ditinggali beberapa kepala keluarga yang masih bisa dihitung jari. Karena pada umumnya, budaya masyarakat Madura, jika satu orang berhasil didaerah dikarenakan merantau dari daerah asal, maka orang itu akan mengajak sanak saudara dan kerabat agar bisa mengikuti jejak keberhasilan meskipun harus dengan kerja keras.

4.1.3 Keadaan Penduduk

Penduduk Desa Gili Ketapang sebagian besar adalah suku Madura dengan bahasa Madura sebagai bahasa yang digunakan sehari-hari. Menurut beberapa penduduk yang diwawancarai oleh penulis, suku Madura nenek moyang penduduk Pulau Gili tepatnya adalah Madura yang berasal dari Kabupaten Sampang. Jumlah total penduduk Desa Gili Ketapang pada tahun 2011 yaitu sejumlah 8.402 jiwa yang terdiri dari 3.941 jiwa penduduk laki-laki dan 4.461 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan agama yang dianut sebagian besar adalah agama Islam dengan komposisi 8.400 penganut agama Islam dan 2 orang penganut agama Katolik. Jadi agama Islam merupakan agama mayoritas masyarakat Pulau Gili.

Kondisi Pulau Gili yang merupakan sebuah pulau kecil yang secara langsung mengakibatkan daerah yang dominan adalah daerah pesisir yaitu mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan, baik sebagai juragan maupun sebagai ABK. Meskipun ada juga beberapa masyarakat Pulau Gili yang bukan merupakan seorang nelayan, melainkan beberapa pekerjaan lainnya. Jenis dan komposisi mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah penduduk Desa Gili Ketapang berdasarkan pekerjaan

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
----	------------------	----------------

1	PNS	37
2	Pedagang	439
3	Buruh Industri	40
4	Usaha Industri Rumah Tangga	49
5	Jasa Angkutan	78
6	Jasa	67
7	Jasa Lainnya	3
8	Pensiunan	15
9	Bangunan	19
10	Nelayan	1980
	Jumlah	2.727

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, 2011

Dapat dilihat dari Tabel 2 di atas bahwa penduduk Desa Gili Ketapang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan, yaitu sekitar 1.980 orang atau sekitar 23,5%. Jumlah tersebut merupakan jumlah terbesar diantara mata pencaharian lainnya seperti pedagang 5,58%, Industri rumah tangga 0,58%, dan jasa angkutan sebesar 0,9%. Hal ini dikarenakan Desa Gili Ketapang merupakan daerah dengan jumlah nelayan terbanyak di tingkat Kabupaten Probolinggo.

4.2 Keadaan Umum Perikanan

Umumnya produksi ikan di Kabupaten Probolinggo ditangkap dengan beberapa alat tangkap seperti *purse seine*, payang, gill net, pancing, bubu dan cantrang. Sedangkan jenis ikan yang banyak tertangkap di perairan kabupaten Probolinggo adalah tembang, layang, kembung, peperek, tongkol, layur, dan lain-lain. Untuk mengetahui hasil produksi dan nilai produksi ikan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 1 dalam lampiran.

Potensi perikanan tangkap yang cukup besar ini tidak lepas dari kondisi wilayah yang cukup luas di wilayah utara pesisir pulau Jawa. Serta dibantu dengan sarana dan prasarana yang cukup menunjang seperti pelabuhan dan tempat pelelangan ikan. Perubahan iklim yang terjadi di kabupaten Probolinggo yaitu dua jenis setiap tahunnya, yaitu musim kemarau

dan musim penghujan. Untuk musim kemarau berlangsung kira-kira pada bulan April hingga bulan Oktober dengan rata-rata curah hujan + 29,5 mm per hari hujan, untuk musim penghujan dari bulan Oktober hingga bulan April dengan rata-rata curah hujan kurang lebih 229 mm per hari hujan. Curah hujan yang cukup tinggi terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret dengan rata-rata curah hujan kurang lebih 360 mm per hari hujan.

Uniknya, diantara dua musim tersebut terdapat musim pancaroba yang biasanya masyarakat Pulau Gili mengenalnya dengan sebutan “Angin Gending” yang ditandai dengan hembusan dan tiupan angin kering yang kencang yang berhembus dari arah Tenggara ke Barat Laut biasa. Dimusim ini, masyarakat Pulau Gili biasanya tidak melakukan kegiatan penangkapan di wilayah penangkapan karena kondisi cuaca yang tidak mendukung dan beralih untuk melakukan kegiatan penangkapan diluar dari wilayah yang biasa mereka datangi.

4.3. Potensi Kearifan Lokal

4.3.1 Petik laut

Tradisi petik laut dilakukan tiap tahunnya tetapi tetap dengan kesepakatan warga pulau Gili, apakah akan dilakukan tahun ini atau tidak. Tradisi ini setelah peneliti wawancara dengan beberapa informan, tanggal dan waktu dilangsungkannya tidak pasti, yang artinya tidak ada ketetapan tanggal pelaksanaan petik laut sudah terjadwal. Hal ini dikarenakan adanya kesepakatan yang didapatkan dengan musyawarah terlebih dahulu yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan sebagian masyarakat pulau Gili, sehingga apabila masyarakat menghendaki maka akan dilaksanakan tradisi petik laut sesuai dengan keinginan masyarakat Pulau Gili. Menurut seorang informan didapatkan informasi sebagai berikut :

Menurut bapak TYB

Dimana *kebede'en* atau kondisi suatu desa itu penghasilannya sepi, biasanya orang desa itu diakit-kaitkan jadi semua tokoh masyarakat berkumpul dan kemudian sepakat untuk mengadakan petik laut.

Sedangkan menurut informan bapak IDR

Tradisi petik laut ini bentuk rasa syukur.kan dulu disini meskipun orang islam aliran yang lain masih kental, kayaknya perpaduan antara hindu, budha. Islam kan tidak mengajarkan tentang petik laut dan pake sesaji, ini mungkin rasa perpaduan itu masih kental. Jadi bentuk ini rasa syukur lah intinya.

Dari hasil musyawarah tersebut juga akan didapatkan berapa biaya yang diperlukan untuk petik laut yang kemudian akan ditentukan pembagian iuran yang dikategorikan dengan melihat jenis pekerjaan dan jika pekerjaannya nelayan pengkategorian dilihat dari jenis alat tangkap yang dimiliki. Misalkan jika kebutuhan biaya yang ditafsir diperkirakan sebanyak 40 juta rupiah, maka nelayan akan dikenakan akan berbeda-beda seperti antara pemilik alat tangkap cantrang, payang dan ABK(anak buah kapal) yang tidak memiliki kapal. Bahkan menurut informan bapak TYB, iuran yang harus dibayarkan oleh pemilik payang mencapai 1 juta rupiah. Setelah disepakati rincian biaya dan berapa yang yang harus dibayarkan oleh nelayan menurut alat tangkapnya akan disiarkan dengan menggunakan pengeras suara kantor desa. Kemudian juga akan ada sanksi moral jika warga belum membayar kewajiban iuran berupa akan disiarkan atau diumumkan juga dengan pengeras suara.

Acara petik laut ini dilakukan dengan semua biaya keperluan ditanggung oleh masyarakat pulau Gili sendiri dengan system iuran bersama. Acara petik laut ini berlaku sebagai penanggung jawab atau pelindung dengan masyarakat yang bersedia sebagai panitia. Pembagian iuran biaya ini didasarkan dengan melihat besar kapal atau jenis alat tangkap nelayan, sedangkan jika tidak mempunyai kapal, dilihat dari pekerjaan sehari-hari dan akan ditentukan besaran nilai dari iuran.

Susunan acara dalam petik laut :

1. *Selamedden* (selamatan) dilakukan oleh masyarakat pulau Gili, biasanya dipimpin oleh tokoh masyarakat setempat.
2. Jittek (perahu replika), replika perahu ini yang bisa dilarung dilaut diisi dengan bermacam sesajen, dari tumpeng hingga kepala sapi dan kemudian akan dilarung

dilaut dengan diiringi kapal-kapal nelayan. Isi dari jittek ini biasanya berupa, kepala sapi, perlengkapan rumah tangga(baju, perlengkapan dapur, kebutuhan manusia sehari-hari), pakaian dan menurut informan bapak IDR, bahkan tradisi petik laut dahulu menggunakan emas dan perhiasan yang diletakkan didalam kedua telinga kepala sapi yang akan dilarung.

3. Pada malam harinya, acara dilanjutkan dengan *kreningen* atau *tabbuen* atau pertunjukkan ketoprak/ludruk, yang khusus sengaja diundang dari Pulau Madura dan akan ditonton beramai-ramai oleh masyarakat Di sebuah lapangan yan terletak disebelah barat wilayah Pulau Gili. Untuk acara ini, masyarakat Pulau Gili menyebutnya dengan sebutan "*kreningan*" atau "*tabbuan*".

Sebenarnya ada beberapa kendala dilaksanakannya petik laut, diantaranya menurut kyai dan ustad setempat misalnya dalam acara petik laut yang menurut informan IDR harus ada adalah seperti acara ketoprak atau ludruk, mengarah ke kemaksiatan dan sedangkan untuk acara larung sesaji atau *jittek* cenderung mengarah ke syirik.

4.3.2 Nyabis.

Tradisi nyabis ini hampir dilakukan oleh semua masyarakat pulau Gili, nyabis dilakukan dengan berkunjung ke kyai yang dipercaya dan diyaini sebagai guru spiritual. Nyabis dilakukan oleh masyarakat Pulau Gili sebagai proses agar mendapatkan barokah yaitu dengan doa dari para kyai, karena anggapan luas masyarakat pulau Gili dengan adanya barokah ini, semua kegiatan mulai dari penangkapan, perdagangan dan semua permasalahan bisa lebih mudah dan lancar.

Menurut informan Bapak TYB

Biasana are jum'at, polana are jum'at ria are libur e pondok, ben are jum'at kapal ria ekapor. Biasana oreng Gili neka ka pondok Genggong, pondok besar e jebe, tojuenna nyare barokah.

Biasanya hari jum'at, karena hari jum'at ini hari dimana pondok pesantren libur. Dan hari jum'at kapal ini dikapur(dibubuhi kapur dan diperbaiki). Biasanya orang Gili ini ke pondok pesantren Genggong, pondok pesantren besar dijawa(diluar pualu Gili), tujuannya untuk mencari barokah.

Pelaksanaan nyabis umumnya dilakukan pada hari jumat, karena menurut asumsi beberapa informan bahwa pada hari jumat, adalah hari libur didalam pondok pesantren dan kyai akan bisa ditemui Karena tidak mengajar santrinya. Hari jumat dipilih karena pada umumnya hari jum'at ini para nelayan di Pulau Gili tidak melakukan penangkapan atau melaut dan kapal akan dibenahi dan dicat dengan kapur dibagian lambung kapalnya. Sehingga tersedia waktu luang untuk melakukan tradisi *nyabis* hingga ke pondok pesantren di Madura dan wisata religi Wali Songo.

Pada umumnya, nyabis dilakukan dengan mengunjungi kyai kemudian, kyai akan memberi wejangan-wejangan dan ceramah singkat, setelah selesai pengunjung akan menyalami kyai sambil memberi uang atau yang lebih dikenal "salam tempel" . uang atau kasarnya berupa salam tempel ini bersifat sukarela, yang artinya dari kyai tidak meminta sepeserpun, sehingga besaran dari uang yang diberikan tidak terikat dan tergantung dari pihak warga yang akan memberi. Kadang kala, jika hasil laut melimpah pada saat nyabis akan membawa hasil tangkapan yang sudah diolah seperti ikan asin dan teri kering sebagai oleh-oleh . tetapi menurut informan bapak TYB,

Kalo orang sini, kebanyakan dikait-kaitkan dengan hasil tangkapan,kalo lama tidak rame hasil penghasilan. Kebanyakan malem Jumat *nyabis*, tapi tidak terikat malem jumat saja, kalo *nyabis* untuk dapat barokah, tapi tidak aka nada kaitannya dengan hasil tangkap, Karena itu tergantung rejeki masing-masing.

Budaya nyabis ini hampir dilakukan oleh semua masyarakat Pulau Gili. Meskipun tidak ada kaitan antara hasil tangkapan atau penghasilan yang didapat setelah nyabis, masyarakat pulau Gili tetap melakukan budaya nyabis sebagai bentuk usaha selain usaha nyata. Hal ini juga bisa analogikan pada saat kita berdoa kepada Tuhan sebagai bentuk usaha "tambahan" selain usaha yang nyata. Dengan agama islam sebagai agama mayoritas dipulau Gili berdoa dan mendekatkan diri kepada ulama merupakan bentuk usaha dalam mendekatkan diri kepada Tuhan.

4.3.3 Pengambek

Sistem patron-client merupakan sebuah interaksi sosial yang hampir selalu ada dalam masyarakat nelayan di Pulau Jawa. Pada umumnya menurut Kusnadi (2010), relasi patron-klien terjadi secara intensif pada suatu masyarakat yang menghadapi persoalan sosial dan kelangkaan sumber daya ekonomi yang kompleks. Di daerah pedesaan dan pinggiran kota yang berbasis pertanian, seorang patron (*bapak buah*) akan membantu klien (*anak buah*) sebagai bentuk usaha untuk mengatasi kebutuhan mendadak klien, atau meringankan beban utang klien pada pelepas uang. Klien menerima kebaikan tersebut sebagai "hutang budi", menghargai, dan berkomitmen untuk membantu patron dengan sumberdaya jasa tenaga yang mereka miliki.

Menurut bapak SGT.

E Gili bede, tape biasana bede latar belakang otang, biasana ka juregen purse seine.

Di Gili ada, tapi biasanya ada latar belakang hutang antara ABK dengan Juragan.

Dalam beberapa kasus yang terjadi di beberapa wilayah dengan masyarakat nelayan, kondisi patron-client digambarkan sebagai "bantuan dari patron kepada client dalam bentuk bantuan ekonomi, yang akhirnya si client akan secara tidak langsung berhutang budi kepada patron". Tetapi menurut informan yang ditemui peneliti, yaitu bapak T, pengambek yang dimaksud disini, yaitu di pulau gili, yaitu adanya kapal yang tugasnya menjemput dan membawa hasil tangkapan kapal penangkap ikan seperti payang jurung dan kemudian dibawa ke tempat pelelangan ataupun ke gudang penampungan yang sudah ada dipulau Gili Ketapang.

Menurut informan Bapak TYB:

Biasanya kalo hasil tangkapan sudah kessa (hasil penuh) dijemput pengambek dan ngojurnya (persenan) dihitung perkeranjang.

4.3.4 Onjem (Rumpon)

Onjem merupakan salah satu cara masyarakat pulau Gili untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan. Cara ini merupakan tradisi yang diturunkan dan diwariskan oleh masyarakat pulau Gili Ketapang dan hingga kini tetap dilakukan. *Onjem* yang dalam

bahasa yang kita kenal adalah rumpon ini dipilih diletakkan diatas *spot* pilihan yaitu yang dianggap banyak terdapat karang disekitaran pulau Gili. Hal ini diasumsikan karena diatas karang tempat berkumpulnya ikan-ikan. Rumpon yang ada di pulau Gili ini masih terbuat dengan cara tradisional. Bahan-bahan dari rumpon ini terdiri dari daun kelapa kering, ranting-ranting kecil, ban bekas, tali "tampar" dan batu besar yang berfungsi sebagai pemberat.

Menurut Informan Bapak SGT :

Bahan onjem ria ban bekas, kolare, papa hasilla mon lha bulan 4, 5, 6 bisa olle 60-80 keranjang, paleng benyak olle juko' lajeng.

Bahan Onjem (rumpon) ini ban bekas, daun kelapa kering. Hasilnya jika sudah bulan 4, 5, 6 bisa dapat 60-80 keranjang kecil. Paling banyak dapat ikan layang.

Karena sifatnya yang turun temurun, jika ada orang tua yang memiliki rumpon maka akan diwariskan kepada anak, dan begitu seterusnya. Karena untuk membuat rumpon sangat sulit untuk menemukan titik *spot* yang pas untuk rumpon yang akan lebih baik jika diletakkan diatas karang. Hasi rumpon yang baik akan didapatkan pada bulan April, Mei, Jun. Pada bulan-bulan itu hasil tangkapan mencapai hingga 60-80 keranjang yang umumnya ikan layang jika masyarakat pulau Gili menyebutnya.

Sifat dari *onjem* yang turun temurun meskipun berada tepat ditengah laut, membuat onjem merupakan suatu gambaran bentuk adaptasi manusia terhadap lingkungan sekitarnya yang dianggap masih ada sampai sekarang meskipun dalam ilmu modern sudah berbeda bentuk dan teknik pembuatannya sangat simpel. *Onjem* adalah rumpon jika dalam bahasa sehari-hari yang kita kenal. Menurut Monintja(1993) dalam Sudirman dan Malawwa (2004) rumpon biasa juga disebut dengan Fish Agregation Device (FAD) yaitu suatu alat bantu penangkapan yang berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul dalam suatu *catchable area* yang penggunaan rumpon sendiri secara tradisional sudah lama dilakukan terutama nelayan di Mamuju, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur, sedangkan penggunaan rumpon secara modern baru dimulai pada tahun 1980 oleh lembaga penelitian laut.

Letak rumpon yang berada ditengah lautan, jika dinalar menurut orang yang awam, jika kita akan mencari rumpon tanpa bantuan GPS (*Global Positioning System*), kita tidak akan mampu mengingat dimana letak rumpon yang telah kita buat. Tetapi kenyataannya masyarakat nelayan Pulau Gili ketika akan melakukan pengkapan dilokasi *onjem* yang mereka miliki, hanya “menggunakan” acuan kondisi alam yang ada disekitarnya tanpa bantuan alat-alat modern seperti saat ini tanpa ada kesulitan. Biasanya menggunakan alat bantu seperti pohon yang terlihat di Pulau Gili dan gunung-gunung yang ada dipulau jawa. bahkan pada saat ini, yang dimana ada pembangunan tower pemancar sinyal dari telekomunikasi, dengan bentuk tower yang sangat tinggi akan sangat memudahkan dalam mencari lokasi rumpon berada.

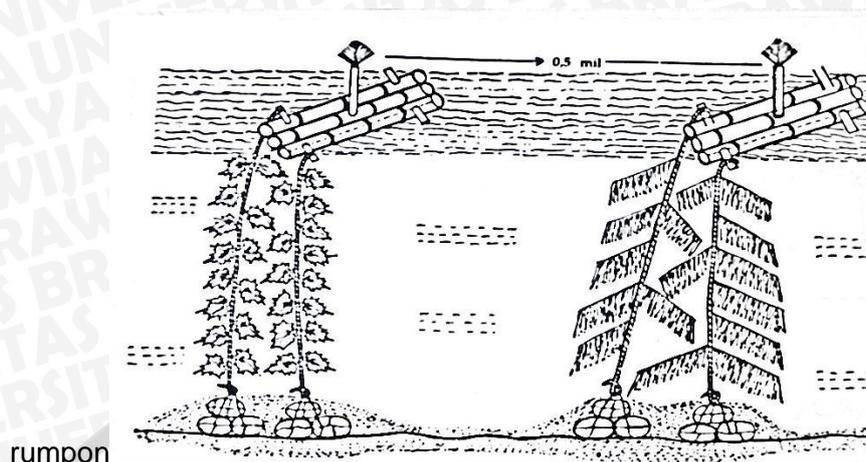
Menurut Informan Bapak TYB:

Jelerenna ngangguy kabungka'an sebede gili, setangale, pas epaloros bereng gunung se paleng jelas otabe tangale, eker-a-ker a dhibik. Biasana mon oreng lambek, mon kadung nemmu karang pas egebeye onjem tape bede ondem, tak mole tape edentek sampek terang teros eancer-ancer jelerenna

Tanda atau patokan menggunakan pepohonan yang ada dipulau Gili yang kelihatan kemudian ditarik garis lurus dengan gunung yang ada disekitar kabupaten Probolinggo yang palig jelas terlihat. Biasanya dulu, masyarakat pulau Gili jika terlaanjur menemukan karang yang bisa dijadikan spot onjem atau rumpontetapi cuaca mendung atau hujan, nelayan tidak akan pulang dan akan ditunggu hingga terang sampai perkiraan tanda yang ada dpulau dan gunung bisa terlihat sebagai penunjuk arah.

Menurut beberapa informan, jika penangkapan dilakukan dilokasi onjem atau rumpon, hasil dari tangkapannya bisa mencapai 4-5 bajong (keranjang). Tidak banyak memang jika dibandingkan dengan hasil tangkapan dengan alat tangkap payang atu sleret yang dioperasikan di laut lepas. Tetapi onjem sangat membantu pada saat kondisi ikan memang tidak didapatkan pada saat operasi penangkapan.

Gambar 4. Sketsa beberapa model



rumpon

Sumber : Arsyad (1999) dalam Sudirman dan Malawwa (2004).

Gambar 5. Penanda Rumpon atau onjem ditengah laut milik nelayan.



Sumber : Dokumen penulis

4.3.5 Kontrak kerja.

Misal antara juragan dan pandega. Jika pandega memiliki hutang kepada juragan, si pandega tidak memiliki hak untuk ikut kerja atau berpindah juragan sebelum hutang yang dimilikinya dilunasi. Kemudian dari segi pembagian hasil. Misalkan hasil tangkapan

setelah diuangkan mendapatkan 1 juta rupiah, maka pertama dipotong biaya melaut, missal dua ratus ribu rupiah, sedangkan sisa RP. 800.000,00 dibagi antara juragan dan pandega sebesar RP. 300.000 untuk juragan, dan RP. 500.000 untuk semua pandega yang ikut.

Ada beberapa istilah masyarakat pulau Gili dalam menyebut posisi-posisi dalam usaha penangkapan dengan menggunakan teknologi payang beserta jumlah yang dibutuhkan dalam setiap satu kali trip penangkapan. Menurut informan bapak SGT :

Ada Tekong (kapten kapal), Juru mudi (nahkoda) atau pengendali kapal), pangrabet (perawat kapal) ben tokang mesin(tukang mesin).

Sistem perekrutan tenaga kerja ABK (anak buah kapal) dipulau Gili tidak resmi dan formal. Dikarenakan disini masih menggunakan kekerabatan yang sangat erat. Pada suatu kondisi, missal menurut beberapa informan yang ditemui penulis. Jika terdapat anak buah kapal yang tidak bisa ikut dalam satu kali trip, jika itu kurang dari tujuh orang, maka tidak akan jadi untuk melaut hari ini.

4.3.6 Telasan.

Tradisi telasan (hari raya) di pulau Gili pada hari ke 27 sebelum hari raya aktifitas melaut sudah mulai dihentikan. Sehari setelah hari raya, aktifitas baru dilanjutkan kembali. Pada waktu-waktu seperti ini harga ikan sangat murah, dikarenakan gudang tempat penjualan hasil tangkap masih tutup sehingga harga ikan sangat murah. Tetapi ada yang menarik dilihat dari kebiasaan masyarakat pulau Gili meskipun belum diteliti kebenarannya secara ilmiah. Menurut informan bapak IDR.

mon oreng Gili sa are tak ngakan juko' ria pettengen, kodu ngakan juko'. Deddi paju tak paju reng Gili teka'na marena tellasan paggun ka tasek.

Orang Gili sehari tidak makan ikan laut, ini pusing, harus makan ikan laut, jadi laku tidak laku orang gili meskipun lebaran tetap pergi melaut.

Terkait dengan hari raya Idul Fitri atau yang dikenal dengan lebaran masyarakat pulau Gili akan melakukan budaya konsumtif yang meskipun ini merupakan budaya yang hampir merata dinegara ini apabila mendekati hari raya Idul Fitri tetapi biaya yang dikeluarkan untuk setiap anggota kepala keluarga hingga mencapai jutaan rupiah. Karena

anggapan masyarakat pulau Gili saat lebaran kondisi pakaian dari atas kepala hingga kaki harus baru. Menurut informan bapak TRN :

Oreng die, parak tellasan paste ka Probolinggo mon kadung a belenje. Belenjena ngabik banyak 1-2 juta sa oreng pakaian dan lain-lain deri attas ka bebe kodu anyar.

Orang sini (pulau Gili) mendekati lebaran pasti ka probolinggo(kota) apabila sudah terlanjur belanja, belanjanya menghabiskan banyak sekitar 1-2 juta setiap anggota keluarga. Baju dan lain-lain dari kepala hingga kaki harus baru.

Tradisi telasan memang tidak dipungkiri adalah tradisi umum masyarakat Islam di Indonesia. Jika merujuk pada kebiasaan masyarakat nelayan pulau Gili ini akan sangat berbeda karena ada aktivitas keseharian yang terhenti yang menunjang kehidupan sehari-hari, yaitu melaut yang merupakan mata pencahariannya. Jika ditelaah lebih jauh, aktivitas ini dapat berdampak positif terhadap lingkungan jika dilangsungkan dalam waktu yang agak lebih lama dan konsekuen dan kontinyu. Efeknya misal, terhadap adanya pemberian waktu terhadap biota laut yang dieksploitasi dalam penangkapan untuk berkembang biak dan melakukan regenerasi. Sehingga kualitas dan kuantitasnya bisa terjaga dengan baik dan berlanjut.

4.3.7 Andun

Andun yaitu suatu proses perpindahan sementara dalam usaha penangkapan ikan oleh nelayan dikarenakan beberapa kendala salah satunya yaitu pengaruh cuaca yang buruk. Misal seperti jika menurut informan T, adanya angin gending dimana angin sangat kencang ditengah laut dan ombak sangat ganas, meskipun ikan melimpah tetapi nelayan enggan untuk menukar resiko keselamatan mereka.

Diantara dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan terdapat musim pancaroba yang biasanya ditandai dengan tiupan angin kering yang cukup kencang yang berhembus dari arah Tenggara ke Barat Laut biasa disebut "Angin Gending". Kondisi ini tidak memungkinkan bagi masyarakat nelayan pulau Gili untuk melakukan penangkapan ikan. Untuk musim kemarau yang berkisar pada bulan April hingga bulan Oktober dengan rata-rata curah hujan + 29,5 mm per hari hujan, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga bulan April dengan rata-rata curah hujan + 229 mm per hari hujan. Curah

hujan yang cukup tinggi terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret dengan rata-rata curah hujan + 360 mm per hari hujan.

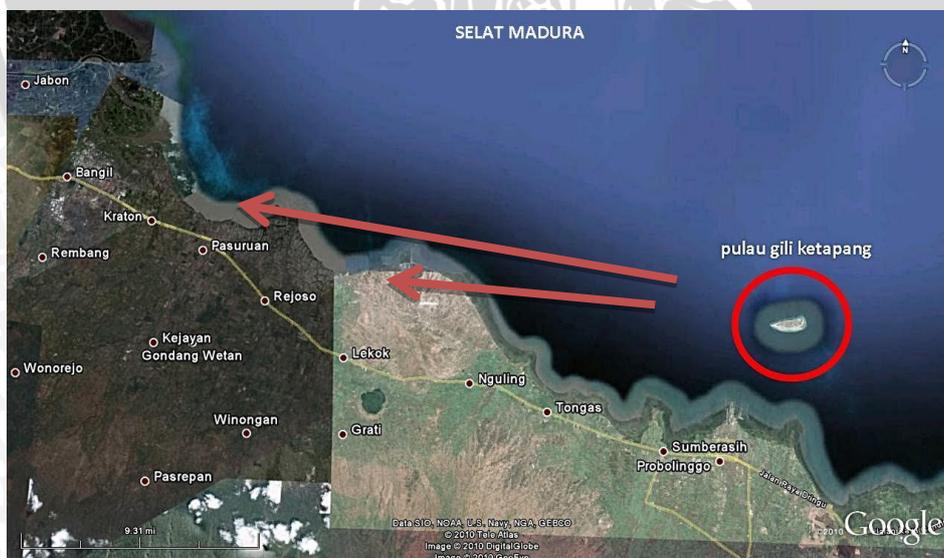
Umumnya nelayan pulau Gili mengandun ke daerah Paiton(perbatasan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Situbondo) dan Kabupaten Pasuruan. Proses andun sendiri dilakukan dengan membawa kapal dan seluruh ABK yang berkenan untuk ikut dalam andun kelokasi yang ditentukan oleh *Fhising master* atau kapten kapal. Umumnya jika terjadi angin gending, yaitu pada bulan-bulan Agustus hingga September dan awal-awal November.

Menurut informan bapak TYB :

Andun, orang Gili andun bulan 7-10 (bede angina gending mon cakna oreng die) andun biasana ka Paiton, lekok dan Pasuruan. Oreng andun ria sak kapal-kapalla kia esambi bereng abk kia. Polana mon kenning gending ria juko' tadek epulau Gili, makana kodu andun ka Pasuruan ka Paiton. Edissa' bede senampung abe' dibi' bereng hasil tangkapanna.

Andun, masyarakat pulau Gili melakukan andun pada bulan 7-10 dikarenakan ada angin gending menurut orang Gili. andun biasanya dilakukan ke Paiton, dan Pasuruan yaitu daerah Lekok. Orang andun ini dengan kapal-kapalnya juga dibawa berikut dengan ABK. Karena jika terkena angin Gending ini tidak ada ikan disekitar pulau Gili, maka dari itu harus andun ke Pasuruan ke Paiton. Disana ada yang menampung kita berikut dengan hasil tangkapan.

Gambar. 6. Lokasi andun masyarakat nelayan pulau Gili



4.4 Konsep kearifan lokal dan kearifan lokal masyarakat pulau Gili

konsep kearifan lokal sebenarnya bersumber dari adat dan hukum adat dalam suatu masyarakat. Sementara itu, Hilman Hadikusumah mengungkapkan bahwa hukum adat Indonesia yang normatif pada umumnya menunjukkan corak-corak sebagai berikut, yaitu :

a) Tradisional

Hukum adat bercorak tradisional, artinya bersifat turun temurun dari zaman nenek moyang sampai ke anak cicit sekarang dimana keadaannya masih tetap berlaku dan tetap dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.

b) Keagamaan

Hukum adat bersifat keagamaan (*magis religius*) artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan atau berdasarkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa.

c) Kebersamaan

Hukum adat bersifat kebersamaan (*communa*) artinya ia lebih mengutamakan kepentingan bersama dimana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama (satu untuk semua, semua untuk satu).

d) Konkrit dan Visual

Hukum adat bercorak konkrit artinya jelas, nyata berujud, sementara visual artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, tidak sembunyi.

e) Terbuka dan Sederhana

Hukum adat bercorak terbuka artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Sementara sederhana artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya mempercayai.

f) Dapat Berubah dan Menyesuaikan

Hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Hukum adat pada waktu yang telah lampau agak berbeda isinya. Hal ini menunjukan perkembangan.

g) Tidak Dikodifikasi

Hukum adat kebanyakan tidak tertulis walaupun ada juga diantaranya yang dicatat di dalam aksara daerah, bahkan ada yang dibukukan dengan cara yang tidak sistematis, namun hanya sekedar sebagai pedoman dan bukan mutlak harus dilaksanakan oleh anggota masyarakat, kecuali yang bersifat perintah Tuhan.

h) Musyawarah dan Mufakat

Hukum adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat di dalam keluarga, di dalam hubungan kekerabatan dan ketetanggan baik untuk memulai sesuatu pekerjaan maupun di dalam mengakhiri pekerjaan apalagi yang bersifat peradilan di dalam menyelesaikan perselisihan antara satu dengan yang lainnya. Keadaannya masih tetap berlaku dan tetap dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Wignjodipoero (1967) dalam Sulaiman (2010) Hukum adat memiliki dua unsur yaitu: (1) unsur kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat; dan (2) unsur psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, artinya adat mempunyai kekuatan hukum.

Jika ditarik dalam suatu bentuk kerangka berfikir adalah sebagai berikut :



Dasar kearifan lokal sebenarnya bersumber dari hukum adat dalam masyarakat. Karena tidak semua hukum adat bisa dikategorikan dalam kearifan lokal menurut beberapa ahli. Maka dari itu ketika sebuah hukum adat sudah bisa dikategorikan dalam kearifan lokal, maka bisa dijadikan pedoman dan salah satu alat dalam usaha pemberdayaan masyarakat yang bertujuan terhadap kondisi yang berkelanjutan yaitu berpihak kepada lingkungan, sosial tanpa meninggalkan aspek ekonominya.

Jika mengacu pada Hilman Hadikusumah maka gambaran kearifan lokal yang ada dalam masyarakat pulau Gili adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Gambaran budaya lokal pulau Gili dalam tabel.

	Petik laut	Nyabis	Pengambek	Onjem	Kontrak kerja	Andun	Telasan
Tradisional	x	x	x	x	x	x	x
Keagamaan	x	x					x
Kebersamaan	x		x		x		x
Konkrit dan visual	x	x	x	x	x	x	x
Terbuka dan sederhana	x	x	x	x	x	x	x
Berubah-ubah	x	x	x	x	x	x	
Tidak dikodifikassi	x	x	x	x	x	x	x
Musyawahar & mufakat	x						

Keterangan : tanda silang (X) menandakan sifat dari kearifan lokal.

Menurut Belkes (1995) dalam Sulaiman (2010) kearifan lokal bersifat kumulatif dengan kepercayaan yang turun temurun terkait antara hubungan masyarakat dengan lingkungan. Menurut beberapa ahli, kearifan lokal dibedakan dengan budaya dalam suatu masyarakat tertentu. Umumnya kearifan lokal memiliki efek secara langsung terhadap kelestarian lingkungan yang didiami masyarakat yang memiliki kearifan tersebut. Secara turun-temurun dan secara tradisional kearifan lokal tersebut sudah ada untuk mencegah akses yang terlalu terbuka yang tentunya dengan konsekuensi merusak.

Menurut Sulaiman (2010) mendefinisikan pengetahuan lokal secara lebih detail sebagai “pengetahuan yang dibangun oleh kelompok komunitas secara turun temurun terkait hubungannya dengan alam dan sumberdaya alam”. Pengetahuan lokal masyarakat meliputi segenap pengetahuan tentang hal-hal yang terkait dengan lingkungan hingga pengetahuan sosial, politik dan geografis.

Menurut Christy (1992) ada enam hal yang harus dipenuhi sebagai syarat-syarat suatu kearifan lokal untuk pengelolaan suatu wilayah. Diantaranya :

- a) Kondisi sumberdaya alam harus memiliki karakteristik yang jelas. Misal berupa terumbu Karang atau ekosistem mangrove.
- b) Batas-batas wilayah yang dimiliki harus jelas dan sudah ditentukan sebelumnya. Misalnya sejauh mana kita boleh menangkap ikan.

- c) Teknologi penangkapan. Harus ditentukan jenis alat dan jenis tangkapan yang akan diatur dalam kearifan lokal.
- d) Budaya, budaya setempat harus sesuai dengan permodelan pemberdayaan kearifan lokal sehingga tidak akan terjadi benturan
- e) Distribusi kekayaan. Harus melindungi model kelembagaan yang sudah ada karena masih adanya politik alam dimana yang kuat akan bertahan
- f) Otoritas pemerintah dan lembaga terkait. Kewenangan dan ketegasan pemerintah juga harus mampu membuat keputusan yang harus dintegrasikan dengan lembaga-lembaga lainnya yang terkait.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, tergambar bahwa kearifan tradisional bukan hanya menyangkut pengetahuan atau pemahaman masyarakat adat tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik diantara manusia satu dan manusia lainnya, melainkan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan bagaimana relasi diantara semua penghuni komunitas ekologi bisa berjalan seimbang tanpa ada salah satu aspek yang tertinggal atau tertindih. Maka dari itu kearifan lokal merupakan suatu jawaban dalam mencari landasan dalam konteks pembangunan berkelanjutan dengan masyarakat sebagai subjek yang akan terlibat langsung.

Kearifan lokal dalam konteks pemanfaatannya sebagai salah satu alat pemberdayaan masyarakat harus memiliki enam unsur tersebut (menurut Christy) maka dari itu dari beberapa kearifan lokal yang ada di Pulau Gili apakah sudah memenuhi ke-enam syarat tersebut atau tidak. Jika dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Gambaran syarat kearifan lokal sebagai model pengelolaan wilayah pesisir

	Petik laut	Nyabis	Pengambang	Onjem	Kontrak kerja	Andun	Telasan
Karakteristik alam	x		x	x		x	
Batas-batas							
Teknologi				x			
Budaya	X	X	x	x	x	x	x
Distribusi Kekayaan	X						
Otoritas pemerintah	X	X	x	x	x	x	x

4.4.1 Interpretasi tabel

a. Petik laut

Dalam tradisi petik laut, dapat kita lihat untuk karakteristik alam sudah jelas dapat terlihat, bahwa laut merupakan objek dari tradisi tersebut. Kemudian dari segi budaya.

Petik laut merupakan budaya dari masyarakat pesisir hampir sebagian masyarakat nelayan di Jawa Timur. Dari segi distribusi kekayaan, biaya yang digunakan dalam petik laut merupakan biaya yang dikumpulkan dari semua lapisan masyarakat pulau Gili yang besarnya dikategorikan berdasarkan dari segi jenis alat tangkap yang dimiliki oleh nelayan. Sehingga antara pemilik alat tangkap payang jurung dan alat tangkap sleret akan berbeda, yang tentunya akan berbeda juga dari tingkat ekonomi nelayan karena biaya operasional dan biaya dalam satu kali trip beserta hasilnya akan sangat berbeda. Sedangkan untuk otoritas pemerintah, adanya petik laut, meskipun pemerintah kabupaten Probolinggo tidak pernah ada campur tangan, tetapi adanya pemerintah desa Gili Ketapang sebagai pelindung dari pelaksanaan tradisi petik laut sudah merupakan tidak adanya pertentangan antara lembaga atau otoritas pemerintah yang ada.

b. Nyabis

Dalam tradisi nyabis, dari enam syarat menurut Christy (1992) hanya aspek budaya saja yang terpenuhi. Karena nyabis merupakan budaya masyarakat pulau Gili yang secara umum beragama islam. Dari aspek karakteristik wilayah tidak terpenuhi karena budaya ini tidak menggunakan pengkategorian wilayah, batas-batas, teknologi, distribusi kekayaan dalam pelaksanaannya. Tradisi nyabis hanya berkaitan erat dengan agama

yang dianut masyarakat pulau Gili, yaitu agama Islam dan tentunya sifat dari masyarakat yang religious. Sedangkan dari otoritas pemerintah, meskipun tidak ada dalam peraturan ataupun ajaran dalam islam yang mewajibkan nyabis, tetapi tradisi ini tidak melenceng dari ajaran agama islam yang justru menyuruh umatnya untuk selalu mendekatkan diri dengan orang-orang mukmin (kyai, tokoh agama, ustad dll). Jadi tidak akan ada undang-undang ataupun ajaran islam yang dilanggar.

c. Pengambek

Tradisi pengambek seperti yang sudah dijelaskan dibab dua, dapat kita lihat bahwa ada karakteristik alam yang merupakan "ladangnya" masyarakat pulau Gili yaitu laut, sudah jelas bahwa laut merupakan karakterisitik yang digunakan dalam tradisi pengambek. Dari aspek budaya, jelas bahwa ini merupakan suatu budaya masyarakat bahari dipulau gili. Pada hakikatnya manusia yang akan terus beradaptasi dengan kondisi alam sekitarnya. Masyarakat pulau Gili denga dikelilingi laut dan nelayan sebagai mata pencahariannya berdaptasi dengan bantuan system pengambek hingga hasil tangkapan dari nelayan yang dilaut sampai pada gudang penyimpanan atau juragan penampung ikan hasil tangkapan. Untuk distribusi kekayaan tidak ada unsur yang memenuhi aspek ini karena system pengambek tidak berkaitan dengan adanya kelas atau strata ekonomi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan untuk otoritas pemerintah, tidak ada hal yang illegal dari system pengambek meskipun tidak adanya hukum yang melindungi system ini tetapi ini merupakan adaptasi masyarakat lokal terhadap lingkungan tempat tinggalnya dan adanya keterkaitan simbiosis mutualisme antara nelayan dan pengambek.

d. Onjem

Onjem yang dalam istilah ilmiahnya sering disebut rumpon, merupakan hasil adaptasi dengan lingkungan. penggunaan rumpon sendiri secara tradisional sudah lama dilakukan terutama nelayan di Mamuju, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur, sedangkan penggunaan

rumpon secara modern baru dimulai pada tahun 1980 oleh lembaga penelitian laut. Laut sebagai karakteristik kondisi alam sudah terpenuhi jika mengacu pada Christy (1992). Onjem merupakan hasil buah pikir yang terjadi karena desakan adaptasi manusia dengan alam. Onjem juga memiliki batas-batas wilayah dalam pengelolaannya, meskipun tidak ada teknologi canggih yang digunakan, dan hanya menggunakan cara tradisional dalam mengetahuinya batas-batas ini bisa ditentukan hukum adat yang melekat seperti misalkan jika onjem ini bukan milik kita, secara naluriah jika ini bukan milik kita maka kita tidak akan melakukan penangkapan ikan di onjem tersebut. Hal ini merupakan sebuah bentuk hukum adat yang tidak tertulis dalam masyarakat pulau Gili. Dari aspek teknologi, meskipun sederhana dibanding rumpon-rumpon modern yang sudah ada saat ini. Teknologi yang digunakan tetap bisa berfungsi dengan baik meskipun hasil tidak maksimal dan banyak dibanding hasil tangkapan dilaut lepas. Sehingga aspek teknologi terpenuhi meskipun sederhana dan tradisional. Aspek budaya juga terpenuhi dalam onjem masyarakat pulau Gili. dapat dilihat dari adanya budaya menghormati "jika ini milikmu maka aku tidak boleh memanfaatkannya tanpa seijinmu" dan apabila ini dilanggar maka hasil akan diambil pemilik onjem dan adanya sanksi moral dari masyarakat pulau Gili. dari aspek distribusi kekayaan tidak terpenuhi karena memang onjem merupakan milik pribadi meskipun berada dilahan komunal dan tidak ada hukum yang melindungi seperti halnya sertifikat tanah pada umumnya. Sedangkan dari aspek otoritas pemerintah, tidak adanya hukum yang melindungi tidak berarti kegiatan atau tradisi ini illegal dan melanggar hukum. Bahkan jika kita lihat dan kaji lebih dalam akan berdampak positif bagi lingkungan.

e. Kontrak kerja

Kontrak kerja seperti yang sudah dijelaskan disub-bab potensi kearifan pulau Gili diatas, merupakan adanya bentuk sosial antara *patron-client*. Dari tradisi ini aspek budaya terpenuhi karena merupakan sebuah kemitraan tradisional menurut Susilo (2009). System ini merupakan sebuah kelembagaan yang mampu menyediakan kebutuhan akan adanya jaminan keberlangsungan hidup dengan jaaminan berupa kontrak

kerja(patron-client). System ini juga memenuhi aspek distribusi kekayaan karena adanya kebutuhan antara masyarakat dengan ekonomi bawah dengan masyarakat ekonomi kelas atas yaitu juragan. Sedangkan dilihat dari otoritas pemerintah,tidak adanya aturan yang jelas dengan system ini meskipun pemerintah terus mencoba dengan memberikan bantuan-bantuan tetapi system ini akan tetap berlangsung lagi dan terus kontinyu seiring dengan ketergantungan masyarakat nelayan dengan alam yang *open acces* dan sifatnya yang tidak pasti.

f. Andun

Andun yaitu suatu proses perpindahan sementara dalam usaha penangkapan ikan oleh nelayan dikarenakan beberapa kendala. Dilihat dari enam aspek syarat sebagai pengelolaan wilayah. Hanya tiga aspek yang terpenuhi, yaitu karakteristik alam dan otoritas pemerintah. Karakteristik alam berupa lautan dengan sifatnya yang terpengaruh oleh adanya cuaca mengakibatkan adanya budaya pindah kelokasi penangkapan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Adanya efek domino tersebut merupakan adanya kaitan antara kondisi alam dengan mata pencaharian sehingga adanya bentuk adaptasi dengan lingkungan. Sedangkan dari otoritas pemerintah tidak adanya aturan dan hukum yang membatasi kegiatan andun dan tidak adanya kegiatan yang merugikan salah satu pihak menjadikan kegiatan ini illegal dari segi hukum adat hukum adat.

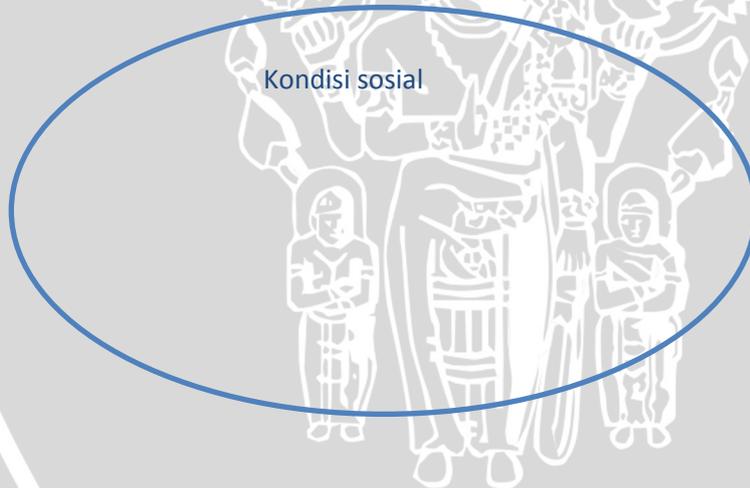
g. Telasan

Tradisi telasan dari enam aspek menurut Christy (1992) yang terpenuhi hanya aspek Budaya, Karena memang tradisi ini sebuah budaya dalam masyarakat nelayan pulau Gili yang religious. Budaya ini dilakukan menjelang hari raya Idul Fitri dan umumnya tiga hari setelahnya. Maka, dilihat dari segi budaya sudah jelas terpenuhi karena adanya unsur religi, menyesuaikan, visual dan terbuka. Dari lima aspek lainnya selain aspek budaya menurut Christy tidak terpenuhi.

4.5 Pemanfaatan kearifan lokal dalam konteks pembangunan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan

Kondisi sumberdaya alam yang terus menerus dieksploitasi tanpa memikirkan adanya keseimbangan alam dan konsep berkelanjutan, terus menerus terjadi di era global seperti ini, dimana permintaan pasar terus menerus menjadi penguasa tanpa mengakibatkan efek domino terhadap kondisi lingkungan yang semakin memburuk. Hal ini mengisyaratkan pentingnya pengelolaan wilayah tersebut untuk dikelola secara terpadu dan bijaksana. Menurut Purwanto (2003) dalam Stanis (2005) Ketersediaan (stok) sumberdaya ikan pada beberapa daerah penangkapan (*fishing ground*) di Indonesia ternyata telah dimanfaatkan melebihi daya dukungnya sehingga kelestariannya terancam. Beberapa spesies ikan bahkan dilaporkan telah sulit didapatkan bahkan nyaris hilang dari perairan Indonesia.

Gambar 7. Gambaran keterkaitan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan



Menurut Tuwo (2011) gambar diatas merupakan gambaran konsep hidup berkelanjutan yang bisa dianalogikan dengan kondisi kehidupan. Jika anda hidup dalam kondisi sosial dan ekonomi yang baik, namun tanpa lingkungan yang baik, maka hanya hidup ekeदार cukup. Jika anda hidup dalam kondisi sosial dan lingkungan yang baik, namun

tanpa kondisi ekonomi yang baik, maka anda akan hidup sengsara. Jika anda hidup dalam kondisi sosial yang baik, maka anda hidup sekedar bertahan. Namun jika anda hidup dalam kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang baik, maka hidup anda akan sejahtera. Hal ini akan sangat

Dalam konsep pembangunan berkelanjutan menurut Anggoro dan Stanis (2005) lebih lanjut menjelaskan bahwa secara ideal pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan hidupnya harus mampu menjamin keberlangsungan fungsi ekologis guna mendukung keberlanjutan usaha perikanan pantai yang ekonomis dan produktif. Keberlanjutan fungsi ekologis akan menjamin eksistensi sumberdaya serta lingkungan hidup ikan yang akan sangat terpengaruh dengan sifat manusia dalam mengeksploitasi sumber daya alam.

Lebih lanjut lagi menurut Supriharyono (2000), beberapa pertimbangan dalam pengelolaan sumberdaya alam yakni meliputi (a) pertimbangan ekonomis, (b) pertimbangan dari aspek lingkungan dan (c) pertimbangan sosial budaya. Pertimbangan ekonomis menyangkut penting tidaknya untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari, penghasil barang-barang yang dapat dipasarkan, merupakan aset lokal, nasional atau internasional serta merupakan aset pariwisata yang dapat menghasilkan uang selain berupa barang. Maka dari itu diperlukan adanya sebuah system yang melindungi keberlanjutan sumberdaya alam.

4.6 Peluang Pembedayaan Kearifan Lokal

Kearifan lokal, tradisi dan budaya yang terdapat dalam masyarakat pulau Gili Ketapang memiliki peluang besar untuk dikelola dan diberdayakan kembali sehingga dapat mengatur kehidupan masyarakat sehari-hari dan norma dan aturan yang berpihak setidaknya dengan lingkungan dalam konteks pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Menurut beberapa informan dan narasumber yang ditemui oleh penulis, masyarakat di lokasi penelitian menyatakan bahwa masyarakat memiliki antusiasme yang tinggi jika aka

nada dilangsungkannya acara petik laut. Hal ini juga tidak jauh berbeda dengan kondisi kepatuhan masyarakat terhadap konsep hak milik onjem meskipun berada dilahan komunal yang open acces. Tidak berbeda dengan budaya dan adat istiadat yang ada dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang sangat religious dan dipatuhi.

Kondisi demikian akan bersifat positif dalam bagaimana kita akan membangun model pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat. Adanya system yang telah terbentuk kuat dan mengakar dalam pori-pori kehidupan masyarakat akan membantu memasukkan *mindset* bagaimana cara sebaiknya dalam memanfaatkan alam lingkungan sekitar. Maka dari itu kondisi masyarakat seperti ini hendaknya menjadi kekayaan budaya dan tradisi yang paling berpotensi dan bermanfaat dalam pengelolaan berbasis masyarakat sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen penting dalam membangun kekuatan sosial untuk upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut.

Dalam konteks pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut peranan lembaga lokal beserta kearifan lokal, tradisi dan budaya setempat memiliki peluang yang sangat strategis untuk dimanfaatkan dalam upaya pembinaan terhadap masyarakat pesisir dan nelayan. Aspek ini dapat dijadikan sebagai jembatan penghubung yang menghubungkan antara program yang akan diterapkan dan otoritas pemerintah dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sehingga diharapkan apapun target kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang direncanakan pemerintah diyakini akan dapat berjalan dengan cepat dan tepat sasaran sehingga memberikan dampak yang positif terhadap keberhasilan dan keberlanjutan program.

Jika dilihat dalam beberapa model pemberdayaan masyarakat dalam membangun manajemen konservasi dan rehabilitasi sumberdaya pesisir dan laut, aspek sosial budaya, tradisi dan kearifan lokal merupakan salah satu faktor pertimbangan yang sangat diutamakan dan harus lebih dominan karena akan sangat erat kaitannya dikarenakan masyarakat lokal adalah masyarakat yang bersentuhan langsung dengan lingkungan objek pembangunan. Hal ini juga didasarkan dengan alasan bahwa apa yang akan dibangun harus dapat diterima menjadi bagian keseharian dari masyarakat setempat dengan tidak

bergesekan datau bahkan bertentangan dengan aspek sosial budaya yang hidup lebih dahulu dan berkembang jauh sebelum akan dibangun model pengelolaan di daerah tersebut.

4.7 Model Pengelolaan dan Pemberdayaan

Konsep *community based management* dengan memberdayakan dan melibatkan masyarakat lokal sebagai salah satu stakeholder yang langsung bersentuhan dengan objek yang akan dikelola dan dimanfaatkan merupakan salah satu solusi dalam mengurangi ketidaksesuaian kebijakan pusat yang bersifat universal atau pukul rata ditengah karakteristik setiap wilayah sangat berbeda. Karakteristik yang berbeda ini bisa berupa budaya, kondisi alam dan sumberdaya manusia setempat. Sehingga kita dapat memanfaatkan masyarakat lokal atau lembaga lokal jika ada akan membantu dalam kesesuaian kebijakan dan model yang kan diterapkan.

Jika kita mendengar Pengelolaan Berbasis Masyarakat atau biasa disebut *Community Based Management (CBM)* menurut Nikijuluw (1994) dalam Nurmalasari (2009) merupakan salah satu pendekatan pengelolaan sumberdaya alam, misalnya perikanan, yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya. Pengelolaan Berbasis Masyarakat dapat diartikan sebagai sustu system pengelolaan sumberdaya alam di suatu tempat dimana masyarakat lokal di tempat tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya.

Dilihat dari kondisi sosial masyarakat pulau Gili, yang memiliki kondisi alam, adat dan budaya sedemikian rupa cukup berpeluang dan berpotensi dibentuk dengan model pemanfaatan kearifan lokal sebagai co manajemen dalam pembangunan ekowisata yang berkelanjutan. Yang berpihak terhadap kondisi lingkungan tanpa mengenyampikan kondisi ekonomi dan budaya setempat sebagai budaya lokal yang kuat dan tetap mengakar dalam masyarakat. Meskipun masih banyak perlu penambahan konsep dan belum adanya struktur dengan baik, sumberdaya masyarakat, budaya masyarakat dan kondisi sumberdaya

alamnya bisa menjadi langkah awal dalam membangun kearifan lokal setempat sebagai model co manajemen pembangunan ekowisata.

Dalam konteks kearifan lokal yaitu pengetahuan lokal yang memiliki keberpihakan dengan kelestarian lingkungan, jika dilihat pada kondisi yang sudah dijelaskan pada beberapa bab diatas dapat kita cermati bahwa ada dua budaya setempat yang berpotensi sebagai kearifan lokal, yaitu petik laut dan onjem atau yang lebih kita kenal dengan rumpon. Sedangkan lima kebudayaan setempat lainnya berupa budaya stempat yang bersifat religious dan adanya ketergantungan suatu lapisan masyarakat nelayan. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan dari kelima budaya tersebut bisa dikelola sebagai bentuk konsep co manajemen meskipun tidak berlatar kearifan lokal. Masih perlu beberapa penambahan konsep agar bisa digunakan sebagai bentuk co manajemen dalam konsep pembangunan berkelanjutan.

Jika kita mengacu pada undang-undang pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu pada pasal 3 dan dijelaskan lagi dalam pasal 4 sebagaimana berikut :

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

berasaskan:

- a. keberlanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. keadilan.

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan:

- a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara

- berkelanjutan; menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan
- d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Oleh karena itu model pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan konsep pembangunan berkelanjutan harus melibatkan adanya peran serta masyarakat dan model yang dibangun tidak bertentangan dengan kondisi sosial, budaya dan adat setempat. Lebih baik lagi akan sangat membantu jika memang ada kearifan lokal setempat yang bisa digunakan sebagai jembatan antara model yang akan dibangun dan objek masyarakat sebagai pelaku utama.

Jika kita melihat kondisi kearifan lokal dan budaya setempat yang akan sangat berpotensi dalam model pembangunan berkelanjutan dapat kita lihat yaitu petik laut dan onjem. Hanya tinggal bagaimana model diadaptasikan dengan kondisi kebutuhan masyarakat pulau Gili sehingga tidak akan ada pertentangan dan sasaran tetap tercapai. Selain itu budaya lainnya seperti nyabis, andun, telasan, kontrak kerja dan pengambek meskipun tidak secara langsung dapat digunakan sebagai instrument dalam pembangunan, sehingga kita harus bentuk ulang tanpa merusak kondisi yang sudah ada karena akan sangat sulit ketika ini merupakan budaya yang mengakar. Maka kita tambahkan pemahaman konsep dan pembentukan lembaga lokal yang lebih terstruktur. Sehingga model community based management merupakan salah satu model yang sangat mungkin diterapkan dalam keseharian dinamika masyarakat Pulau Gili Ketapang.

4.8 Membangun Model Pengelolaan Sumberdaya Berbasis Masyarakat

Strategi membangun masyarakat pesisir dalam rencana pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu, yang sifatnya non struktural dan struktural. Dari kedua pendekatan ini, nantinya perlu adanya kesepakatan

lokal yang ada didalam masyarakat dengan dilindungi oleh pemerintah kabupaten sebagai pelindung dari adanya kesepakatan lokal yang dibuat dan diterapkan dalam masyarakat lokal. Non structural adalah pendekatan yang subyektif. Pendekatan ini menggunakan pendekatan secara mental dan pengetahuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan anggota masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan sumberdaya dalam lembaga yang nantinya akan dibangun. Sehingga diharapkan nantinya, ketika “wadah” masyarakat dalam bentuk lembaga lokal telah terbentuk, sumberdaya manusia yang ada didalamnya bisa menggerakkan dengan baik dan akan tercapai sasaran dan tujuan yang diharapkan.

Pendekatan struktural adalah pendekatan yang menyeluruh yang menekankan pada penataan system, pembentukan lembaga dan struktur sosial politik yang ada dalam masyarakat *direbuild*. Pendekatan ini menggunakan peranan dari lembaga lokal jika memang ada dan tentunya yang berwenang atau lembaga yang dibentuk untuk pengelolaan pesisir laut jika memang tidak ada. Dalam membangun lembaga lokal memang peranan masyarakat sangat dominan dan penting tetapi akan kurang kuat karena aspek structural biasanya akan lebih efektif jika dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai otoritas kewenangan, sehingga perlu adanya tuntunan atau bimbingan pada langkah awal merintis dan membangun suatu system dan lembaga pada masyarakat pesisir. Kemudian dengan pendekatan Kedua pendekatan tersebut harus saling mendukung, melengkapi dan dilaksanakan secara berkaitan dalam satu kesatuan.

1. Pendekatan Subyektif.

Pendekatan non struktural atau subyektik adalah pendekatan yang menempatkan manusia sebagai subyek yang mempunyai keleluasaan untuk berinisiatif dan berbuat menurut kehendaknya dengan diiringi pemahaman konsep atau wawasan sebagai landasan guna mencapai sasaran yang akan dicapai. Pendekatan ini masyarakat lokal ketika telah memiliki pengetahuan, keterampilan dan kesadarannya dapat meningkatkan peran sertanya sebagai subjek yang akan

melakukan tindakan langsung dalam masyarakat pada saat mengelola sumberdaya yang ada disekitarnya.

Dengan membekali wawasan dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan masyarakat meskipun butuh waktu yang lama tetapi akan sendirinya masyarakat lebih menyadari keterkaitan dengan lingkungan dan juga akan terbentuk sendiri suatu mata pencaharian alternatif misalnya jika lingkungan pulau Gili yang kotor maka akan dapat sendirinya dibentuk konsep ekowisata yang tentunya mendatangkan sumberdaya ekonomi bagi masyarakat setempat. Maka dari itu otoritas pemerintah Kabupaten Probolinggo harus memberikan minimal meningkatkan dan membuka wawasan dan pengetahuan dengan beberapa cara, misal penyuluhan dan pelatihan masyarakat agar terlibat aktif. Contoh-contohnya diantara lain :

- a. Pengembangan keterampilan masyarakat.
- b. Peningkatan pengetahuan dan wawasan lingkungan
- c. Peningkatan animo masyarakat agar berperan serta
- d. Peningkatan kualitas pendidikan formal sumber daya manusia
- e. Memberikan motivasi masyarakat untuk berperanserta.

Jika mengacu pada penjelasan diatas, maka kita dapat memasukkan langkah-langkah tersebut kedalam beberapa adat dan budaya yang sudah teridentifikasi pada masyarakat pulau Gili. diantaranya :

- a) Tradisi petik laut, pada susunan acaranya terdapat beberapa hal yang dalam pikiran logis tidak masuk akal dan kurang bermanfaat tanpa harus mengganti dan menghilangkan ditambahkan acara yang lebih bermanfaat dan dampaknya langsung kepada lingkungan sekitar dan masyarakat. Dalam beberapa acara yang terdapat pada upacara petik laut dapat kita modifikasi tanpa harus menghilangkan kondisi asli, seabagi berikut :
 - Pada upacara larung sesaji, ditambahkan pelepasan bibit-bibit ikan dalam jumlah banyak sehingga ada manfaat lingkungan yang didapat.

- Selain pada upacara larung sesaji, ditambahkan kegiatan transplatasi terumbu karang dilaut dangkal sekitar pulau gili. kegiatan ini memutuhkan ahli dalam bidangnya, maka dari itu diperlukan kerja sama dengan ahli terkait tanpa melepas peran serta masyarakat pulau Gili.
- Pada acara hiburan petik laut, yang umumnya dilangsungkan selam dua hari, selain adanya pagelaran kesenia ludruk Madura, akan lebih bermanfaat, pihak pemerintah masuk dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan sehingga penambahan wawasan dan pengetahuan masyarakat tercapai.
- Upacara petik laut, seyogyanya diagendakan dalam setiap tahun dengan pasti sehingga ini bisa dijadikan komoditi pariwisata dan bisa menambah nilai jual pulau Gili yang seharusnya bisa dijadikan sebagai lokasi ekowisata.

b) Onjem yang dimiliki masyarakat pulau Gili masih bersifat tradisional dan masih dimiliki hanya beberapa segelintir orang. Dengan kondisi demikian, pemerintah akan lebih baik memberikan penyuluhan yang baik dalam pembuatan rumpon, alat-alat yang dibutuhkan seperti GPS dan bantuan tenaga ahli sehingga lebih banyak onjem yang dimiliki setiap warga. Yang nantinya diharapkan, pada kondisi musim paceklik, meskipun hasil ikan sedikit yang didapatkan dari rumpon, setidaknya menjamin ketersediaan ikan sebagai komoditas utama nelayan. Selain itu, adanya transplatasi terumbu karang secara jangka panjang akan meningkatkan ketersediaan sumberdaya ikan dilaut.

2. Pendekatan struktural.

Tujuan pokok pendekatan struktural adalah terbentuknya struktur, lembaga lokal dan sistem yang terbentuk tersebut, antara semua aspek dan sistem kehidupan, baik di wilayah pesisir dan laut maupun aspek pendukung yang terkait, termasuk aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Dengan penataan aspek struktural, diharapkan masyarakat mendapatkan kesempatan lebih luas untuk dapat memanfaatkan sumber

daya alam secara berkelanjutan. Selain itu membangun struktur sosial dan ekonomi tersebut diharapkan dapat menciptakan adanya peran vital bagi masyarakat untuk ikut serta melindungi sumber daya alam dari ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan masalah-masalah ekonomi yang utama yang selama ini secara terus menerus menempatkan masyarakat lokal pada posisi yang sulit. Pendekatan struktural pada masyarakat pulau Gili dapat dilakukan dengan langkah-langkah strategi sebagai berikut :

a. Membentuk lembaga lokal.

Dengan kondisi masyarakat pulau Gili yang religious dan antusias missal pada saat upacara petik laut, bisa dimanfaatkan dengan membentuk struktur tetap yaitu sebuah lembaga yang berperan dalam mengatur segala aspek kehidupan. Misal mengatur kondisi lingkungan sekitar yang sangat kotor dengan memberlakukan aturan-aturan yang disepakati oleh bersama.

Pada saat kondisi lembaga telah kuat, maka dengan sendirinya akan tercipta masyarakat mandiri dalam mebentuk lingkungan yang sehat berbasis masyarakat tanpa meninggalkan kesejahteraan dan kondisi lingkungan yang baik.

b. Pengembangan akses masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan.

Menurut Nurmalasari (2009) Keberhasilan pengembangan masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan pesisir dan laut sangat tergantung pada ketepatan kebijakan yang diambil. Kebijakan yang dikembangkan dengan melibatkan dan memperhatikan kepentingan masyarakat dan menjamin keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan wilayah. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan karena akan menghasilkan kebijakan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan kepentingan masyarakat. Kebijakan yang berbasis pada potensi masyarakat akan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam. Selain itu juga memberikan keuntungan ganda : pertama, dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat maka pengelolaan pesisir dan laut akan

menarik masyarakat sehingga akan mempermudah proses penataan. Kedua, memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut bertanggung jawab atas kondisi pesisir dan laut. Selain itu yang lebih penting lagi adalah adanya upaya untuk meningkatkan kepentingan hakiki masyarakat yaitu kesejahteraan.

c. Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi.

Informasi merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan masyarakat pantai sebagai bagian dari pengelolaan pesisir dan laut. Ketersediaan informasi mengenai potensi dan perkembangan kondisi wilayah dan sumber daya alamnya sangat berharga untuk penyusunan kebijakan, program dan kegiatan di wilayah tersebut.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pulau Gili Ketapang seperti yang telah dijabarkan pada bab satu hingga bab empat, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Terdapat tujuh tradisi atau budaya yang terdapat di pulau Gili ketapang, yaitu : Petik laut, onjem, nyabis, andun, kontrak kerja, pengambek, dan telasan. Dari ketujuh tradisi tersebut hanya dua yang berpotensi sebagai kearifan lokal yang memenuhi syarat menurut Christy (1992) yang dapat digunakan dalam membangun hak guna wilayah perikanan. Yaitu onjem dan petik laut.
2. Pembangunan yang dapat diterapkan dengan melihat kondisi budaya dan kondisi masyarakat setempat adalah model pembangunan berkelanjutan dengan berbasis masyarakat lokal atau yang lebih sering disebut co manajemen . Terdapat dua pendekatan yang harus dilakukan pada konsep pembangunan yang dilakukan pada masyarakat pulau Gili, yaitu pendekatan struktural dan pendekatan non struktural.
3. Untuk pendekatan non structural diperlukan beberapa pendekatan, diantaranya adalah, Pengembangan keterampilan masyarakat. Peningkatan pengetahuan dan wawasan lingkungan. Peningkatan animo masyarakat agar berperan serta. Peningkatan kualitas pendidikan formal sumber daya manusia Memberikan motivasi masyarakat untuk berperan serta. Sedangkan untuk pendekatan structural diantaranya Membentuk lembaga lokal, Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi, Pengembangan akses masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan.

4. Pada upacara petik laut dapat ditambahkan acara yang bersifat lingkungan agar dapat terpenuhi sebagai kearifan lokal dalam pengelolaan wilayah perikanan di antaranya :

- Pada upacara larung sesaji, ditambahkan pelepasan bibit-bibit ikan dalam jumlah banyak sehingga ada manfaat lingkungan yang didapat.
- Selain pada upacara larung sesaji, ditambahkan kegiatan transplatasi terumbu karang dilaut dangkal sekitar pulau gili. kegiatan ini membutuhkan ahli dalam bidangnya, maka dari itu diperlukan kerja sama dengan ahli terkait tanpa melepas peran serta masyarakat pulau Gili.
- Pada acara hiburan petik laut, yang umumnya berlangsung selama dua hari, selain adanya pagelaran kesenian ludruk Madura, akan lebih bermanfaat, pihak pemerintah masuk dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan sehingga penambahan wawasan dan pengetahuan masyarakat tercapai.
- Upacara petik laut, seyogyanya diagendakan dalam setiap tahun dengan pasti sehingga ini bisa dijadikan komoditi pariwisata dan bisa menambah nilai jual pulau Gili yang seharusnya bisa dijadikan sebagai lokasi ekowisata.

Pada budaya onjem dapat diperbaiki dan diperbanyak dengan peran serta pemerintah dalam memberikan penyuluhan yang baik dalam pembuatan rumpon, memberikan alat-alat yang dibutuhkan seperti GPS dan bantuan tenaga ahli sehingga lebih banyak onjem yang dimiliki setiap warga. Yang nantinya diharapkan, pada kondisi musim paceklik, meskipun hasil ikan sedikit yang didapatkan dari rumpon, setidaknya menjamin ketersediaan ikan sebagai komoditas utama nelayan. Selain itu, adanya transplatasi terumbu karang secara jangka panjang akan meningkatkan ketersediaan sumberdaya ikan dilaut.

5.2. Saran

Bagi Pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo:

1. Pembangunan berbasis masyarakat tidak serta merta dilakukan mandiri oleh masyarakat, perlu bantuan dari pemerintah mulai dari biaya, tenaga ahli dan kebijakan-

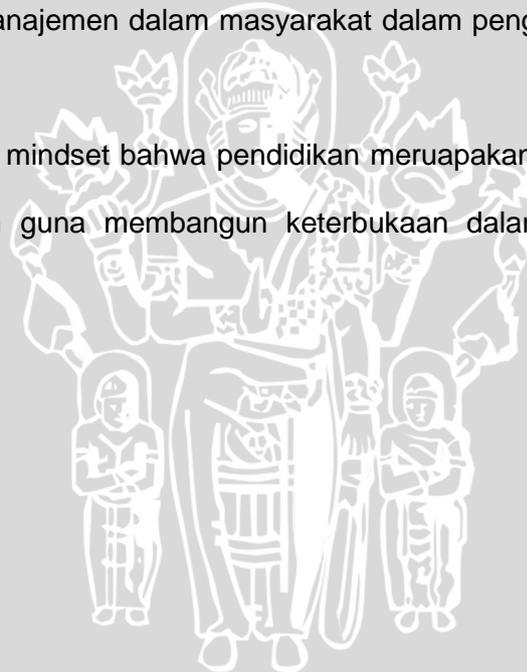
kebijakan yang dikeluarkan agar pembangunan berkelanjutan dengan berbasis masyarakat lokal bisa terwujud.

2. Pembangunan yang dilakukan di Pulau Gili Ketapang harus melihat berbagai aspek, seperti sektor ekonomi, masyarakat, sosial, budaya, dan pemerintah desa, daerah maupun pusat. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan antara satu dengan yang lainnya. Untuk mewujudkan keterpaduan tersebut maka dalam perencanaan pembangunan harus mengintegrasikan semua semua kepentingan pada sektor-sektor yang terlibat. Maka dari itu perlu ada musyawarah untuk mencapai kata mufakat dalam perencanaan pembangunan. Seperti kerjasama Bappedakab dan Departemen Kelautan dan Perikanan Kabupaten Probolinggo dalam perencanaan rencana strategis pengelolaan pulau dan pesisir.
3. Untuk memanfaatkan potensi sumberdaya alam di pulau Gili yang masih sangat berpotensi untuk dikembangkan diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh pada usaha peningkatan keterampilan dan pengetahuan terhadap teknik-teknik budidaya melalui kegiatan pelatihan dan pelatihan serta studi banding di tempat-tempat yang sudah maju. Disamping itu dukungan dana dan aspek pemasaran hasil usaha budidaya perikanan
4. Dalam merangkai kebijakan-kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan, baik dalam usaha pemanfaatan maupun dalam pengelolaan sumberdaya alam laut dan pesisir di pulau gili, dan kabupaten Probolinggo secara umum, perlu dipertimbangkan kekayaan kearifan lokal yang ada dan dilakukan identifikasi karakteristik sosial masyarakat pesisir secara cermat. Ini penting dilakukan dalam membentuk nilai yang terwujud dalam kehidupan sehari hari sebagai dasar dan filosofi dalam membangun keserasian, keharmonisan antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya, sehingga membawa hasil yang optimal.
5. Untuk itu dalam strategi pengelolaan, pengawasan sumberdaya pesisir dan pemberdayaan masyarakat diharapkan sedapat mungkin nilai kearifan lokal, tradisi/hukum adat beserta sistem kelembagaan yang ada, baik kelembagaan yang

nyata berupa struktur masyarakat adat dan organisasi formal pemerintahan maupun Lembaga formal, Keputusan Bupati, Keputusan Camat, sampai Keputusan Desa hendaknya dapat mengakomodir dan memanfaatkan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup, bertumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

Masyarakat Pulau Gili Ketapang:

1. Perlu adanya keterbukaan dalam menerima hal baru berupa wawasan dan pengetahuan sehingga tidak terjadi ketidak berhasilan model pembangunan berbasis pengetahuan lokal
2. Perlu adanya penguatan kelompok-kelompok atau lembaga sehingga mudah dalam terbentuknya model co manajemen dalam masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lingkungan Pulau Gili.
3. Perlu adanya perubahan mindset bahwa pendidikan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan guna membangun keterbukaan dalam pengetahuan dan wawasan.



Daftar Pustaka

- Anonymous. 2007. **Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Desa Sabang Mawang, Sededap dan Pulau Tiga Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau**. BPP-PSPL UNRI. Riau
- Christy, Jr, Francis T. 1982. **Territorial use rights in marine fisheries: definitions and conditions**. Fishery Development Planning Service. FAO Fishery Policy and Planning Division.
- Hendrie, J. 2009. **Riset Pemasaran**. Universitas Gunadarma
- Masri. 2010. **Identifikasi Karakter Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat Nelayan Sungai Limau di Kabupaten Padang Pariaman dalam Penyediaan Perumahan Pemukiman**. Thesis UNDIP, Semarang.
- Mardoyo. 2008. **Pengendalian Mutu Kinerja dan Kompetensi**. Jurnal Penelitian
- Moleong, Lexy J. 2004, **Metodologi Penelitian Kualitatif**. PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nasution, Rozaini. 2003. **Teknik Sampling**. Jurnal Universitas Sumatera Utara.
- Nikijuluw, Victor, P.H. 2003. **Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir dalam Strategi Pemberdayaan Mereka dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu**. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Departemen Kelautan dan Perikanan-RH
- Ridwan, Nurma A. 2007. **Landasan Keilmuan Kearifan Lokal**. Jurnal STAIN Purwokerto. Purwokerto.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, sofian. 1989. **Metode Penelitian Survey**. LP3ES, Jakarta.
- Stefanus. 2005. **Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Melalui Pemberdayaan Kearifan Lokal di Kabupaten Lembata Popinsi Nusa Tenggara Timur**. Thesis UNDIP, Semarang.
- Suhartini. 2009. **Kajian Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan**. Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Susilo, et al. 2009. **Sosiologi Peikanan. Edisi 2**. Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya. Malang.
- Tumanggor, Rusmin. 2007. **Pemberdayaan Kearifan Lokal Memacu Kesetaraan Komunitas Adat Terpencil**. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sosial. Volume 12 No. 1. Januari-April 2007
- Tuwo, Ambo. 2011. **Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan Laut**. Brillan Internasional, Surabaya.
- Widodo, Harge, T. 2010. **Ketimpangan Pembangunan Dan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Pulau Kecil Studi Kasus Pada Pulau Gili Ketapang, Kecamatan Sumber Asih , Kabupaten Probolinggo**. Universitas Brawijaya. Malang.
- Yin, Robert, K. 2002. **Studi kasus desain dan metode**. Rajawali pers. Jakarta

Yusof, R. 2004. **Penyelidikan sains sosial**. PTS Publications and distribution Sdn Bhd. Malaysia.



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Hal
1.	Tabel 1. Produksi perikanan tangkap tiap jenis ikan, harga dan nilai produksinya tahun 2011	75
2.	Gambar 1. Gapura selamat datang di pulau Gili Ketapang	77
3.	Gambar 2. Contoh tradisi Petik laut di Jawa Timur	77
4.	Gambar 3. Kapal nelayan dengan alat tangkap payang	78
5.	Gambar 4. Aktivitas perekonomian warga di dermaga	78
6	Gambar 5. Aktivitas pengolahan ikan teri warga pulau Gili	79
7	Gambar 6. Kantor desa	79
8	Gambar 6. Informan dan peneliti	80
9	Gambar 7. Perangkat desa	80
10	Tabel 2. Keterangan Penulisan	81